



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1481, 2021

KEMENPPN/BAPPENAS. Rencana Aksi.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

b. bahwa untuk penajaman dan sinergi program kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditugaskan untuk mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Tahunan

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
2. Penyelenggaraan Rencana Aksi adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang bertugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.
4. Dewan Pengarah Tim Koordinasi untuk selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah pimpinan kementerian

dan lembaga yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.

5. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7. Ketua Harian Tim Koordinasi adalah Menteri yang ditugaskan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan teknis Rencana Aksi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Menteri menetapkan Rencana Aksi Tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
 - a. pendahuluan; dan
 - b. matriks Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
- (2) Matriks Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. matriks bidang; dan
 - b. matriks program prioritas tinggi.

- (3) Matriks bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- bidang sumber daya manusia unggul, inovatif, berkarakter, dan kontekstual papua;
 - bidang transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir;
 - bidang infrastruktur dasar dan ekonomi;
 - bidang kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
 - bidang tata kelola pemerintahan, dan keamanan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
- (4) Matriks program prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- program prioritas tinggi bidang sumber daya manusia unggul, inovatif, berkarakter, dan kontekstual Papua;
 - program prioritas tinggi bidang transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir;
 - program prioritas tinggi bidang infrastruktur dasar dan ekonomi;
 - program prioritas tinggi bidang kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
 - program prioritas tinggi bidang tata kelola Pemerintahan, dan keamanan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
- (5) Matriks Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kesesuaian dengan prioritas nasional, rincian output (RO), lokus, target, tahun penyelesaian, sumber pendanaan, dan penanggung jawab.

Pasal 4

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk:

- pedoman bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional untuk menajamkan, menyinergikan, dan

mengoordinasikan kesesuaian dengan prioritas nasional, rincian output (RO), lokus, target, tahun penyelesaian, sumber pendanaan, dan penanggung jawab percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat beserta integrasi pendanaannya sebagai acuan dalam pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi;

- b. panduan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga; dan
- d. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 5

Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau pemerintah kabupaten/kota melaksanakan Rencana Aksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Rencana Aksi secara teknis dikoordinasikan oleh Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi.
- (2) Dalam rangka penyelarasan Penyelenggaraan Rencana Aksi dengan pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Menteri selaku ketua harian Tim Koordinasi berkoordinasi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Pasal 7

- (1) Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi tahun selanjutnya.

Pasal 8

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian/lembaga pelaksana Rencana Aksi menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Aksi ke dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyampaian hasil pelaksanaan Rencana Aksi ke dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik 4 (empat) bulanan.
- (5) Dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pertemuan berkala antara kementerian/lembaga pelaksana Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Tim Koordinasi.

Pasal 9

- (1) Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi menyusun laporan berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal terjadi perubahan pada kesesuaian dengan prioritas nasional, rincian output (RO), lokus, target, tahun penyelesaian, sumber pendanaan, dan penanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan penganggaran.
- (3) Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dewan Pengarah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Aksi ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rencana Aksi disusun pertama kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dalam periode Tahun 2021-2022.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI PAPUA DAN
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN
2021-2022

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan untuk memajukan wilayah Papua dan mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan afirmasi ini semakin kuat dengan status otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua tahun 2001 dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian disusul dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan status otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat.

Setelah dua puluh tahun pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, kedua provinsi ini dinilai oleh Pemerintah belum mencapai hasil-hasil pembangunan yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang tetap tinggi, tingkat pendapatan rumah tangga yang rendah, serta pendidikan dan kesehatan yang belum memadai ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Sejak ditetapkannya kebijakan afirmasi untuk Papua dan Papua Barat tahun 2001 melalui UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

Pemerintah telah berulang kali menetapkan kebijakan afirmasi dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan Papua diantaranya dengan ditetapkannya:

1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat;
3. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat; dan
4. Instruksi Presiden Nomor No 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Selain kebijakan afirmasi tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat, maka pada tahun 2020 dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat untuk mengawal pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Tim Koordinasi ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dimana pendekatan secara menyeluruh dari sisi sosial ekonomi, politik dan budaya sangat diperlukan. Dalam pelaksanaannya, strategi pelaksanaan Inpres 9 tahun 2020 yang berfokus pada 11 strategi pendekatan, yaitu:

1. pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;

2. pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP);
3. percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit di jangkau;
4. penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;
5. pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan melibatkan peran serta masyarakat;
6. pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dan pengusaha lokal Papua;
8. peningkatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen kemitraan multi pihak;
9. peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi;
10. Peningkatan kerjasama Pemerintah, TNI/Polri, Pemerintahan Daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai; dan
11. penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Wilayah Papua.

Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga dilaksanakan dalam semangat transformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua yang difokuskan pada 5 kerangka baru untuk Papua, yaitu:

1. percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif dan berkarakter yang mempertimbangkan kontekstual Papua di seluruh wilayah Pulau Papua yang dikhususkan kepada Orang Asli Papua (OAP);
2. percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi Papua yang berkualitas dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keterkaitan antarwilayah, kota-kampung, wilayah adat, kemitraan antar pelaku ekonomi, dan potensi sektor-sektor ekonomi daerah yang dikelola secara terpadu dari hulu ke hilir yang terfokus kepada Orang Asli Papua (OAP);
3. percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu guna mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi Papua di seluruh wilayah Pulau Papua;
4. peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon sesuai kearifan lokal, zona ekologis, dan penataan ruang wilayah di Pulau Papua dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
5. percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka penguatan otonomi khusus, pelayanan publik, demokrasi lokal yang inklusif, harmoni sosial, dan keamanan daerah yang aman dan stabil serta penghormatan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

B. MATRIKS RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
1. Matriks Bidang
a. Bidang SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter, dan Kontekstual Papua

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
1	3	3	1	Pelayanan kesehatan ibu dan bayi	Pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
2	3	3	1	Pelayanan Antenatal Care (ANC)/ pemeriksaan selama kehamilan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	90%	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
3	3	3	1	Program rumah tangga persalinan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
4	3	3	1	Pelayanan persalinan tenaga kesehatan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	91%	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
5	3	3	1	Pelayanan postpartum/setelah kelahiran	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	90%	2021-2022	APBN, DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
6	3	3	1	Penguatan Puskesmas Poned	Lokus tahun 2021 adalah 11 puskesmas	11 Puskesmas	2021	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
7	3	3	1	Penguatan RS Ponek	Lokus tahun 2021 adalah 6 RS	6 RS	2021	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
8	3	3	1	Penguatan public	1. Sorong	2 Kab/Kota	2021	DAK	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
9	3	3	5	Penurunan Stunting	sfefry center 119 Fasilitasi dan Pembinaan Daerah pada Penyenggaraan Pelayanan Ibu dan Anak	Provinsi Papua	1 Provinsi	2022	APBN	Kesehatan; Pemerintah Daerah Kementerian Kesehatan	Kesehatan
10	3	3	2		Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	92%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
11	3	3	2		Balita kurus mendapat makanan tambahan	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	92%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
12	3	3	2		Pelaksanaan Surveilans Gizi	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
13	9	9	8		Tenaga kesehatan yang dilatih Pemantauan Pertumbuhan Balita	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	250 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
14	3	3	1		Pelatihan Pelayanan Pijat bayi dibawah dua tahun untuk Tumbuh Kembang Anak bagi Tenaga Kesehatan	Provinsi Papua	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
15	3	3	1		Pelatihan Pelayanan Pijat bayi dibawahh dua tatum untuk Tumbuh Kembang Anak bagi Tenaga Kesehatan	Provinsi Papua Barat	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
16	3	3	5		Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	Provinsi Papua	6 Kelompok Masyarakat	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
17	3	3	5		Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	Provinsi Papua Barat	6 Kelompok Masyarakat	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
18	5	5	4		Penyediaan Antropometri Kit	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	90%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah	Kesehatan
19	7	7	6		Tenaga Kesehatan yang dilatih Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBIA)	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	152 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
20	8	8	7		Tenaga kesehatan yang dilatih Pencegahan dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk pada Balita	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	490 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
21	3	3	3		Pengendalian Penyakit Menular	1. Wilayah Adat Lae Pago 2. Wilayah Adat Domberay	4 Kegiatan	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
22	3	3	3	Surveilans KIP1 di Papua dan Papua Barat Pendidikan dan pelatihan bidang imunisasi di Papua dan Papua Barat Bimbingan teknis imunisasi di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay 3. Wilayah Adat Laa Pago 4. Wilayah Adat Domberay	2 Layanan	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
23	3	3	3			137 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
24	3	3	3		1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	22 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
25	3	3	3		Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di Papua dan Papua Barat Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di Papua dan Papua Barat IRS /Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit kategori II (Wilayah Adat Laa Pago dan Domberay)	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	8 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan
26	3	3	3		1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	160 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
27	3	3	3		1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberay	200 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
28	3	3	3		Peningkatan SDM Malaria di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	2518 Orang 2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
29	3	3	3		Bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	8 Daerah (Prov/Kab/Kota) 2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
30	3	3	3		Surveilans dan deteksi dini penyakit malaria tingkat Wilayah Adat Laa Pago dan Domberry	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	40 Layanan 2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
31	3	3	3		IRS /Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	8 Layanan 2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
32	3	3	3		Survei Daerah Massal Malaria (angka parasite rate) Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	4 Layanan 2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
33	3	3	3		Peningkatan SDM Kab/Kota Endemis tinggi malaria Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	77 Orang 2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP								
34	3	3	3	Pro P	Prta Assessment eliminasi malaria Kab/Kota Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
35	3	3	3		Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	12 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
36	3	3	3		Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	23 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
37	3	3	3		Surveilans dan deteksi dini penyakit filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	62 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
38	3	3	3	Pelaksanaan POPM filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	8 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan	

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
39	3	3	3	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	80 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
40	3	3	3	Peningkatan SDM pengendalian filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	10 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
41	3	3	3	Bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	7 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
42	3	3	3	Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit TB di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	4 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
43	3	3	3	Layanan deteksi dini terduga TBC Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	28 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
44	3	3	3	Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS tingkat Provinsi Deteksi dini penyakit HIV/AIDS dan IMS di Papua dan Papua Barat Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	12 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
45	3	3	3		1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	13 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
46	3	3	3		1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	4 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
47	3	3	3	Surveilans dan deteksi dini penyakit kusta di Papua dan Papua Barat Pendidikan dan pelatihan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan frambusia di Papua dan Papua Barat	1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	99 Layanan	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
48	3	3	3		1. Wilayah Adat Laa Pago 2. Wilayah Adat Domberry	4.380 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP								
49	3	3	5	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat kesehatan Puskesmas	1. Asmat 2. Blak Numfor 3. Boven Digol 4. Delyai 5. Dogiyai 6. Irtan Jaya 7. Jayapura 8. Jayawijaya 9. Kepulauan Yapen 10. Lanny Jaya 11. Mamberamo Raya 12. Mamberamo Tengah 13. Mappi 14. Merauke 15. Mimika 16. Nabire 17. Nduga 18. Paniai 19. Pegunungan Bintang 20. Puncak 21. Puncak Jaya 22. Sarmi 23. Supiori 24. Tolikara 25. Waropen 26. Yahukimo 27. Kota Jayapura 28. Fakfak 29. Kaimana 30. Marokwari 31. Marokwari	140 Puskesmas	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
					Selatan 32. Maybrat 33. Pegunungan Arfak 34. Raja Ampat 35. Sorong 36. Sorong Selatan 37. Tambora 38. Teluk Bintuni 39. Teluk Wondama 40. Kota Sorong					
50	3	3	5	Pemerintahan Sarana Prasarana dan Alat kesehatan Rujukan	1. Fakfak (RSUD Fakfak) 2. Sorong (RSUD Sorong) 3. Manokwari (RSUD Manokwari, RSUD Prop Papua) 4. Kaimana (RSUD Kaimana) 5. Sorong Selatan (RSUD Scholoo Keyen) 6. Raja Ampat (RSUD Raja Ampat) 7. Teluk Wondama (RSUD Teluk	65 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								
						Wondanani) 8. Kota Sorong (RSUD Sele Be Solu) 9. Merauke (RSUD Merauke) 10. Jayawijaya (RSUD Warneai) 11. Jayapura (RSUD Yowari, RSUD Jayapura, RSUD Abeputa, RSJ Abeputa) 12. Nabire (RSUD Nabire) 13. Yapen (RSUD Serui) 14. Pantai (RSUD Pantai) 15. Puncak Jaya (RSUD Mula) 16. Mimika (RSUD Mimika) 17. Boven Digoel (RSUD Boven Digoel) 18. Mappi (RSUD Mappi) 19. Asmat (RSUD Asmat) 20. Yahukimo						

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
51	3	3	5		Perkembangan jaringan telemedicine di Rumah Sakit dan Puskesmas	21. Pegunungan Bintang (RSUD Oksbali) 22. Sami (RSUD Sami) 23. Keerom (RSUD Kwatiggal) 24. Biak Numfor (RSU Biak) 25. Lanny Jaya (RSUD Tiom) 1. Keerom (RSUD Kerom) 2. Mamberamo Raya (RSUD Kavera) 3. Tolikara (RS Pratala Karubaga) 4. Marokwar (RS Pratala Warure) 5. Kaimana (Puskesmas Wabo, Puskesmas Kambala) 6. Marokwar (Puskesmas Prafi, Puskesmas Masni, Puskesmas	4 RS dan 45 Puskesmas	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						7. Sidey) Marokwart Selatan (Puskemas Ransiki) 8. Maybrat (Puskemas Ayumart, Puskemas Alfat) 9. Pegunungan Arfak (Puskemas Anggi) 10. Sorong Selatan (Puskemas Teminabuan, Puskemas Moswaren) 11. Teluk Bintuni (Puskemas Babo, Puskemas Aranday) 12. Sorong (Puskemas Klamono, Puskemas Mayamuk, Puskemas Makbon) 13. Fakfak (Puskemas Karas, Puskemas					

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						14. Teluk Wondama (Puskesmas Wasior) 15. Raja Ampat (Puskesmas Wasai) 16. Nabire (Puskesmas Wanggarani, Puskesmas SP1) 17. Biak Numfor (Puskesmas Ampo bukor, Puskesmas Yondori) 18. Manberrano Tengah (Puskesmas Ilugwa) 19. Mappi (Puskesmas Kota I, Puskesmas Eci, Puskesmas Bade, Puskesmas Mur, Puskesmas Sabapikyal 20. Boven Digoel (Puskesmas					

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						21. Mimika (Puskesmas Potowalbitu, Puskesmas Kokorao, Puskesmas Agimiga) 22. Yapen (Puskesmas Menawi, Puskesmas Mumbel, Puskesmas Kosiwoj) 23. Sarmi (Puskesmas Bonggo, Puskesmas Bonggo Timur, Puskesmas Betaf, Puskesmas Buruh, Puskesmas Sarmi) 24. Jayapura (Puskesmas Denta, Puskesmas Unurunggay, Puskesmas Sawoy)					
52	3	3	5		Pelayanan telemedicine di Papua	Lokus tahun 2021 adalah 3 fasyankes	18 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
53	3	3	5	Pelayanan telemedicine di Papua Barat	Pelayanan telemedicine di Papua Barat	11 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2021-2022	DAK	Daerah	Kesehatan
54	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
55	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
56	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
57	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
58	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
59	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
60	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
61	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
62	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
63	3	3	5		Pelayanan Kesehatan Bergerak	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
				Bergerak						
64	3	3	5	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Fakrak	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
65	3	3	5	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Manokwari Selatan	1 Desa	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
66	3	3	5	Lembaga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam memenuhi persyaratan survei akreditasi	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
67	3	3	5	Sosialisasi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
68	3	3	5	Dukungan Akreditasi Puskesmas	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
69	3	3	5	Dukungan Akreditasi Rumah Sakit	1. Puncak Jaya (RSUD Mulla) 2. Waropen (RSUD Rumah Rodo Fajol) 3. Nduga (RS Pratama Elvirida Sara) 4. Mamberamo Tengah (RSUD Luikas Enembe,	9 RS	2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
70	3	3	5		Pengembangan Griya Sehat	1 Kab./Kota	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
71	3	3	5		Pengembangan Griya Sehat	1 Kab./Kota	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
72	3	3	5		Pembinaan dan Penguasaan Penyehat Tradisional	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
73	3	3	5		Pembinaan dan Penguasaan Penyehat Tradisional	17 Lembaga	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
74	3	3	5		Pembangunan RS Pratama	1 RS	2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
75	3	3	5		Pembangunan RS Vertikal Papua	1 RS	2021-2022	Punjaman Luar Negeri	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
76	3	3	5		Pembinaan	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
					Daerah pada Penguatan PSC 119	Provinsi Papua	40 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
77	3	3	5		Workshop Penyeleenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Integrasi di Rumah sakit						
78	3	3	5		Workshop Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Integrasi di Rumah sakit	Provinsi Papua Barat	40 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
79	3	3	5		Workshop Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional Empiris	Provinsi Papua	30 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
80	3	3	5		Workshop Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional Empiris	Provinsi Papua Barat	30 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
81	3	3	5		Facilitasi dan Pembinaan Daerah pada Pengumpulan rencana operasional RS Rujukan Nasional	Provinsi Papua	1 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
					ke RS rujukan Provinsi dan RS Regional						
82	3	3	5		Pertemuan koordinasi pengembangan Fasilitas di RSUD Perbatasan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
83	3	3	5		Fasilitasi dan Pembinaan Daerah pada Penyelenggaraan Pelayanan SI SRUTE	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
84	3	3	5		Fasilitasi dan Pembinaan Daerah Standar RS Pendidikan	Provinsi Papua Barat	1 Provinsi	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
85	3	3	5		Fasilitasi dan Pembinaan Daerah pada Penyelenggaraan Pelayanan Kanker	Provinsi Papua	1 Provinsi	2022	Dekonsentrasi	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
86	3	3	5		Layanan Kesehatan dalam mendukung PON XX tahun 2021	Provinsi Papua	1 Layanan	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
87	3	3	5		Pelatihan Manajemen Puskesmas	Provinsi Papua dan Papua Barat	192 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
88	3	3	5	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	1. Boven Digoel (RSUD Boven Digoel) 2. Kaituma (RSUD Kaituma)	80 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
89	3	3	5	Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (DS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGs) Papua dan Papua Barat	Provinsi Papua dan Papua Barat	135 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
				3. Jayapura (RSUD Yowari Sentani)	4. Nabire (RSUD Nabire) 5. Waropen (RSUD Rumah Rodio Fabel) 6. Paniai (RSUD Paniai)					
90	3	3	5	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Provinsi Papua dan Papua Barat	470 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
91	3	3	5	Pelatihan Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	Provinsi Papua	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
92	3	3	5	Pelatihan Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas	Provinsi Papua Barat	25 Orang	2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
93	3	3	5		Pelatihan Uji Kompetensi Jabatan fungsional kesehatan	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
94	3	3	5		Pelatihan Surveilans Kesehatan Berbasis Epid Bagi Petugas Puskesmas	Provinsi Papua dan Papua Barat	120 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
95	3	3	5		Pelatihan Promkes bagi Petugas Puskesmas	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
96	3	3	5		Pelatihan TQC di Puskesmas	Provinsi Papua dan Papua Barat	600 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
97	3	3	5		Pelatihan STBM Stunting	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
98	3	3	5		Pelatihan Pelayanan Terpadu PTM	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Orang	2021	APBN (Dekon)	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
99	3	3	5		Pelatihan Pembinaan Makanan Bayi dan Anak	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
100	3	3	5		Pelatihan vaksinator	Provinsi Papua dan Papua Barat	3.180 Orang	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
101	3	3	4		Penguatan Promosi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	8 Kelompok Masyarakat	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
102	3	3	4		Promosi Peningkatan Literasi Germas melalui berbagai	1. Jayapura 2. Waropen 3. Sorong 4. Teluk Wondama	8 Promosi	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
103	3	3	4	Pengembangan Lingkungan Sehat	media	Worlana	4 Kegiatan	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
					Koordinasi Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) (Pengawasan Sanitasi Pangan Siap Saji pada PON 2021)	1. Jayapura 2. Mimika 3. Kota Jayapura 4. Merauke					
104	3	3	4		Alat Higien Sanitasi Pangan Dalam Rangka PON (Dukungan Pengawasan Kualitas Kesling pada PON 2021)	1. Jayapura 2. Mimika 3. Kota Jayapura 4. Merauke	4 Unit	2021	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
105	3	3	4		Kab/Kota yang dilasitasi dan dibina dalam Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	29 Kab/Kota Provinsi Papua dan 1 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	30 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
106	3	3	4		Kab/Kota yang dilasitasi dan dibina dalam Pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	29 Kab/Kota Provinsi Papua dan 1 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	30 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
107	3	3	4		Kab/Kota yang dilasitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis	10 Kab/Kota Provinsi Papua dan 13 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	23 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
					Masyarakat (STBM)						
108	3	3	4		Kab/Kota yang dinasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	2 Kab/Kota Provinsi Papua dan 13 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	15 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
109	3	3	4		Kab/Kota yang dinasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Sarana Air Minum (SAM)	5 Kab/Kota Provinsi Papua dan 13 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	18 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
110	6	1	2		Kab/Kota yang dinasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di fasilitas pelayanan kesehatan	15 Kab/Kota Provinsi Papua dan 13 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	28 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
111	3	3	4		Kab/Kota yang dinasilitasi pengelolaan intervensi Keling dalam penanggulangan TB	10 Kab/Kota Provinsi Papua dan 4 Kab/Kota Provinsi Papua Barat	14 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P						
112	3	2	2	Penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	722.610 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan
113	3	2	3	Pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	162.356 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan
114	3	2	3	Penyelenggaraan bantuan sosial program keluarga harapan/keuarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat	963.360 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan
115	3	2	3	Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh pemberdayaan	1. Jayapura 2. Keerom 3. Teluk Wondama 4. Tambora	521 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan
116	3	2	3	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan akreditasi	Nasional 34 Provinsi	8.000 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P						
117	6	2	1	Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan psikososial	Nasional 34 Provinsi 279.000 Keluarga Penerima Manfaat	2021-2022	APBN	Kementerian Sosial	Kemiskinan
118	3	5	2	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Potensial di Pedesaan yang dilatih tentang kepemimpinan	Provinsi Papua 60 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
119	3	5	2		Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Peningkatan Kapasitas PUG/PPRG Penurunan Stunting	Provinsi Papua 1 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
120	3	5	2		Standarasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Provinsi Papua Barat 1 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
121	3	5	2		Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG di bidang Ekonomi	Provinsi Papua Barat 1 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
122	3	5	2	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam KG, PHP dan PA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
123	3	5	1		Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
124					Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SDG's
125	3	4	2	Sarana Prasarana Pendidikan	1. Kota Malang 2. Yogyakarta 3. Makassar 4. Minahasa 5. Jakarta	Rancangan Perpres Asrama Mahasiswa Nusantara	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
126	3	4	2	Pembangunan Unit Sekolah Baru berpola asrama	SMA Unggulan Kasuari Manokwari (Distrik Manokwari Selatan)	1 unit	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
127	3	4	2	Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri	1. MAN IC Sorong 2. MAN Keerom	2 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan
128	3	4	2	Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri	1. MIN Keerom 2. MIN 1 Merauke 3. MIN Fak Fak 4. MIN Yamuei Kokoda Sorong Selatan 5. MIN Aimas Kab. Sorong	5 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan
129	3	4	2	Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Tsanawiyah Negeri	1. MTsN Merauke 2. MTsN Kab. Sorong 3. MTsN Fak Fak	3 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan
130	3	4	2	Pembinaan SID SMP Satu Atap	Provinsi Papua dan Papua Barat	900 lembaga	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
131	3	4	2	Revitalisasi SD- SMP berpola asrama	SD SMP YBRCK Papua Cerdas Pegunungan Bintang	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
132	3	4	2	Revitalisasi SD berpola asrama	SD Inpres Malagat Lanny Jaya	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
133	3	4	2	Revitalisasi SD- SMP-SMA berpola asrama	SD, SMP, SMA Terpadu Mee Pago Pantai	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
134	3	4	2	Revitalisasi SMP berpola asrama	1. SMP N Kroujendit Mindiptana Boven Digoel 2. SMP N Airu Jayapura	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
135	3	4	2	Revitalisasi SMK berpola asrama	1. SMK Foley Misool Raja Ampat 2. SMK Nambioman Bapai Mappi	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP								
136	3	4	2	Bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Revitalisasi SMA berpola asrama	1. SMA Negeri 3 Kota Jayapura 2. SMA N 1 Ilaga Puncak 3. SMA Negeri Marau Kepulauan Yapen	Sarana prasarana ruang kelas sekolah berpola asrama dan penunjang	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
137	3	4	2		Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2.895 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
138	3	4	2		Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	4.234 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
139	3	4	2		Beasiswa KIP Kuliah	Provinsi Papua dan Papua Barat	21.467 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
							28.019 orang	2022	APBN, APBD		
140	3	4	2		Beasiswa LPDP	Provinsi Papua dan Papua Barat	-	2021-2022	APBN	Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P						
141	3	4	3	Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	Pengangkatan Guru Honorer Sebagai Guru Tetap (P3K)	Papua: 4669 orang; Papua Barat: 2.750 orang	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
142	3	4	3	Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	Guru yang mengikuti pembinaan sertifikasi	4.536 orang	2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
						727 orang	2021-2022			
143	3	4	1	Penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Model kurikulum yang dikembangkan	Model kurikulum masyarakat adat	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
144	3	4	3	Usulan : Optimalisasi Relawan Pendidikan	Optimalisasi Relawan Pendidikan (Kampus Mengajar)	Kampus Mengajar 128 orang; PHP2D: 4 ormanwa	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
145	3	7	1	Peningkatan kualitas pendidik vokasi	Guru Kejuruan dan Instruktur kursus /yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	31 orang	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
						25 orang	2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
146	3	7	1	Peningkatan peran dan kerjasama industri dalam	Pengembangan SMK Mendukung Industri Pertanian, Pariwisata, dan	2 sekolah	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP								Pro P
				pendidikan vokasi	Kesehatan				Teknologi		
147	3	7	1	Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK	Provinsi Papua dan Papua Barat	43 ruang 25 ruang	2021 2022	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; ; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
148	3	7	1		SMK yang Mengembangkan <i>Teaching Factory</i>	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 Sekolah	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
149	3	7	2	Gedung Perguruan Tinggi Yang Diveritalisasi	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas Negeri Papua	Manokwari	1 ruang perpustakaan	2021	SBSN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
150	3	7	2		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas Cenderawasih	Kota Jayapura	1 gedung kuliah Fakultas Ilmu Keolahragaan 1 review KDP Rumah Sakit	2021 2021-2022	SBSN APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan	Infrastruktur
151	3	7	2		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas	Metruke	1 KDP Auditorium	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	Infrastruktur

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Musamus					Teknologi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
152	3	7	2	Penyediaan Sarana Pendidikan	Pembangunan Perguruan Tinggi Okmin	Pegunungan Bintang	1 paket	2021 -2022	APBD	Pemerintah Daerah	Infrastruktur
153	3	7	2		Pembangunan Poltekrik Wamena	Jayawijaya	Persiapan kajian Pelaksanaan kajian	2021 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
154	3	7	2		Pembangunan Universitas Kamasan	Blak Numfor	Persiapan kajian Pelaksanaan kajian	2021 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
155	3	7	2		Transformasi Poltekrik Kesehatan Jayapura menjadi Institut Kesehatan Jayapura	Kota Jayapura	1 rekomendasi	2021 -2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
156	1	3	3	Facilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar	Facilitasi Pendidikan Formal S2 dan S3 melalui Tugas Belajar Bagi Dosen dalam dan luar negeri	Provinsi Papua dan Papua Barat	12 orang	2021 -2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
157	3	4	3	Revitalisasi	Pengembangan	1. Merauke	1 Modul	2021 -2022	APBN	Kementerian	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
				LPTK	Kurikulum Keguruan Kompetensi Sosial Budaya (Sekolah Pendidikan Guru) Kolese Pendidikan Guru	2. Mimika 3. Nabire 4. Sorong				Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
158	3	4	3		Revisi Spektrum Keahlian SMK (Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5 /KK/201 8) dan Spektrum Keahlian SMK (Perdijen Dikdasmen Nomor 07/D.D5 /KK/201 8)	Pusat	1 kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
159	3	7	1		Peserta Mengikuti Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau	1. STIKES Jayapura 2. STIKES Papua 3. STMIR Kreatindo Marokwari 4. Univ Amal Imliah Yapis Wamena 5. Univ Kristen Papua 6. Univ. Muhammadiyah Sorong 7. STIE Port Numbay, STMIR	2.136 mahasiswa	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						Aganua Warrena 8. STM IK 10 Nov JP 9. STKIP Kristen Warrena]					
160	3	4	1		Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	1. Intan Jaya 2. Yalimo 3. Dogyal 4. Mamberamo Tengah 5. Lanny Jaya 6. Supriori 7. Tolikara 8. Mappi 9. Boven Digoel 10. Puncak Jaya 11. Nduga 12. Keerom 13. Tolikara 14. Yahukimo 15. Asmat 16. Pegunungan Bintang 17. Nabire	Pemanfaatan Akun Pembelajaran secara daring di 200 sekolah	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
161	3	4	1		Fasilitasi layanan Ruang Belajar Digital di daerah 3T (Live Streaming, Video Pembelajaran, Lathian/Tygoz dan lainnya)	Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran di 200 sekolah	2022				

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								
						18. Jayawijaya 19. Paniai 20. Mamberamo Raya 21. Pegunungan Arfak 22. Tambora 23. Teluk Wondama 24. Sorong Selatan 25. Maybrat						
162	3	4	4		Peningkatan budaya mutu pendidikan	Penyusunan <i>roadmap grand design</i> pengembangan pendidikan Papua	1 dokumen	2021-2022	APBD	Pemerintah Provinsi Papua	Pendidikan	
163	4	2	1		Perlindungan, pengembangan , dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah, dan kearifan lokal	Penguatan lembaga kepercayaan dan adat	7 lembaga	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	SDGs	
164	4	2	3		Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan	Wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	3 desa	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	SDGs	
165	3	4	2		Penanganan Anak Tidak Sekolah	<i>Informal Learning Center</i> . Penyusunan kurikulum pendidikan	1000 learning center di 42 kabupaten/kota di Papua dan Papua barat	500 learning center	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Pendidikan,	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					nonformal berbasis kearifan lokal					Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Partisipasi dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
166	3	4	2		<i>Informal Learning</i> Center. Pembentukan lembaga pengelola pusat belajar informal	42 Kab/kota	22 lembaga/ organisasi	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
167	3	4	2		<i>Informal Learning</i> Center. Pembangunan pusat belajar dan sarana prasarana penunjang	42 Kab/kota	4 gedung dan sarana prasarana penunjang	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Partisipasi dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pekerjaan	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
168	3	4	2	<i>Informal Learning</i> Center: ToT kurikulum	42 Kab/Kota	44 pelatihan	2021-2022	APBN	Umum dan Perumahan Rakyat	Pendidikan
169	3	4	2	<i>Informal Learning</i> : Monitoring dan evaluasi	42 Kab/Kota	44 dokumen	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
170	3	4	2	<i>Informal Learning</i> Center: Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk	42 Kab/Kota	22 pameran	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
171	3	4	2	<i>Informal Learning</i> Center: Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk	42 Kab/Kota	44 kompetisi	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
172	3	4	2	<i>Informal Learning</i> Center: Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk	42 Kab/Kota	264 podcast	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
173	3	4	2	<i>Informal Learning</i> Center: Penyusunan modul dan pengukuran	42 Kab/Kota	1 modul	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
174	3	4	2	perubahan perilaku secara online <i>Informal Learning Center</i> , Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk.	42 Kab/Kota	22 produk	2021-2022	APBN	Tim Staf Khusus Presiden; Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan
175	3	5	3	Manajemen Talenta Papua Pengembangan Talenta Muda Papua dan Penyelenggaraan Kejuaraan di Tingkat Provinsi (menuju Nasional dan Internasional)	Provinsi Papua dan Papua Barat	680 peserta didik	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
176	3	5	3	Membangun dan mengembangkan sistem data base talenta muda Papua yang terintegrasi	Pusat	12.000 data entry	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
177	3	5	3	Penyusunan Modul Pelatihan: Nasionalisme, Kepemimpinan, pengembangan diri	Pusat	Penyusunan Kerangka Modul, FGD Modul Pelatihan, pemberian, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Modul	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
178	3	5	3	ToT Modul	Pusat	90 pelatih	2021-2022	APBN	Kementerian	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
179	3	5	3							
				Pendampingan dan pembinaan talenta muda Papua	Nasional	2.000 profil	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
180	3	5	3							
				Branding talenta	Nasional	288 publikasi	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
181	3	5	3							
				Distribusi talenta (Affirmasi Action untuk ASN, BUMN dan Perusahaan multinasional)	Nasional	1 regulasi/ Kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
182	3	5	3							
				Gedung dan fasilitas penunjang serta operasional	Pusat	Diskusi lintas K/L, Pemda dan Universitas dan 11 Pusat Studi	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
183	3	5	3							
				Sekretariat MTP	Pusat	Gedung Sekretariat	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri;	Pendidikan

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P						
									Tim Staf Khusus Presiden RI	
184	3	5	3		Pusat	10 staf	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
185	3	7	3	Pemanfaatan Iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan berkelanjutan	Provinsi Papua dan Papua Barat	12 lap	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
186	3	7	3	Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 Purwarupa	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	SDGs
187	3	7	3		Provinsi Papua dan Papua Barat	3 desa	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	SDGs
188	3	7	3	Peningkatan Kualitas Lulusan PT	Provinsi Papua dan Papua Barat	6 Start Up	2021	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional	SDGs
189	3	7	4	Penataan sistem	Provinsi Papua dan Papua Barat	316 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan	SDGs

No	PN/PP/KP/Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
				pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade					Olahraga	
190	3	7	4	Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade	Provinsi Papua dan Papua Barat	orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs
191	3	7	4	Pengembangan budaya olahraga	Provinsi Papua dan Papua Barat	100%	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs
192	3	7	4	Fasilitasi penyelenggaraan dan / atau keikutsertaan	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 Paket	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs

b. Bidang Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir

No	PN/PP/KP/Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
1	1	8	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	Provinsi Papua dan Papua Barat	17 Unit	2022	APBN	Kementerian Perdagangan	Infrastruktur
2	1	8	3		Pelaksanaan Sekeloh Pasar	Provinsi Papua dan Papua Barat	690 Orang	2022	APBN	Kementerian Perdagangan	Kemiskinan
3	2	7	4	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	Revitalisasi Gudang non-SRG	Kota Jayapura	1 Unit	2022	APBN	Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah	Infrastruktur
4	2	7	4		Blmtek dan Pengembangan Sistem Informasi Gerdal Maritim	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Perdagangan	Ketenagakerjaan
5	2	7	4		Penataan Perkampungan tradisional sebagai pendukung "Wisata Perbatasan"	Kota Jayapura	1 unit	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah	Kemiskinan
6	2	7	4		Pembangunan Home Stay kampung Terapung Perbatasan	Kota Jayapura	2 Unit	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemangku Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
7	1	6	1	Pengembangan industri kimia, farmasi dan logam	Teluk Bintuni	1 Badan Usaha	2022	KPB-U	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kemiskinan
8	1	6	1	Facilitasi Investor Dalam Rangka Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	Teluk Bintuni	1 Kabupaten	2022	APBN	Kementerian Perindustrian	Kemiskinan
9	1	4	3	Peningkatan Produksi Perikanan	Provinsi Papua dan Papua Barat	12.000 kg	2021 - 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
10	1	4	3	Sarana pembenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat	Provinsi Papua dan Papua Barat	15 paket Kebun Bibit Rumput Laut Kuljar	2021 - 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
11	3	7	1	Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1. Purcuk Jaya 2. Faklak	2 Lokasi	2021	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
12	3	7	1	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perlindungan Yang Kompeten	Teluk Wondama	22 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ketenagakerjaan
13	2	7	6	Pengembangan KEK Sorong	Sorong	1 Badan Usaha	2021-2022	APBN	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P			Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP								Pro P
14	1	4	4	Peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	1. Merauke 2. Kota Sorong	2 Fasilitas Kawasan	2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
15	1	8	4	Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penetapan Sali Teluk Cenderawasih	Blak Numfor	1 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
16	1	8	4	Penerapan <i>Sustainable Tourism Practices</i> Di Destinasi <i>Branding</i> dan Prioritas	Raja Ampat	1 DPP dan destinasi branding	2021-2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan	
17	1	8	4	Dukungan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat dalam pembangunan kepariwisataan sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS);	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 Paket	2021-2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan	
18	1	8	4	Rencana Induk Pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP)	Raja Ampat	1 Dokumen	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan	
19	1	4	2	Pengembangan pariwisata bahari Taman Nasional Laut Teluk	Teluk Wondama	1 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan	

No	PN / PP / KP / Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Cenderawasih						
20	1	4	2		Pertintisan Destinasi Pariwisata: ekowisata berbasis Kawasan Hutan Prioritas, taman bumi (geopark), dan wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
21	4	2	2		Pertataan Kawasan Cagar Budaya Altimuri	Teluk Wondama	1 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
22	4	2	2		Rehabilitasi kawasan situs budaya Gereja Tua Isana Jetti Yendi, dan Gua Tengkorak Roswar di Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih	Teluk Wondama	1 Paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Infrastruktur
23	1	6	3		Peningkatan aksesibilitas, amenities, dan atraksi, serta daya dukung destinasi	Provinsi Papua Barat	8 Destinasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P			Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P						
				pariwisata	Manado-Likupang) + 2 DPP baru					
24	1	6	3		Pusat Informasi Pariwisata berbasis Geopark	16 Geopark dalam DPP	2021 - 2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
25	1	6	3		Pertintasan destinasi pariwisata: wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan), wisata budaya (<i>heritage tourism</i> , wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada <i>Cultural Heritage</i> Regeneration, dan wisata kampung), dan wisata buatan (<i>meeting-incentive-convention-exhibition/MICE</i> dan wisata olahraga)	Proinsi Papua dan Papua Barat	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
26	1	5	3	Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	Pelatihan	1. Jayapura 2. Merauke 3. Sorong	2021	APBN, DAK	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;	UMKM

No	PN / PP / KP / Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
27	1	5	3		Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi: Penerapan Manajemen Koperasi Modern	1. Teluk Wandana 2. Teluk Bintuni 3. Sorong Selatan 4. Tambora 5. Intan Jaya 6. Purcak Jaya 7. Asmat 8. Pegunungan Bintang 9. Tolikara 10. Keerom 11. Waropen 12. Supiori 13. Mamberamo Raya 14. Nduga 15. Lanny Jaya 16. Mamberamo Tengah 17. Dogiyai 18. Yalimo 19. Purcak 20. Deiyai 21. Mappi	10 Koperasi	2022	APBN	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	UMKM

No	PN / PP / KP / Pro P			Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
28	2	7	4	Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Provinsi Papua	720 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
29	2	7	4	Pembangunan amenities wisata di daerah tertinggal (Pembangunan Amphitheater)	Jayawijaya	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
30	2	7	4	Pengembangan amenities wisata di daerah tertinggal (Pembangunan Homestay)	1. Teluk Wondama 2. Jayawijaya 3. Tambora	3 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
31	2	7	9	Bantuan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1. Merauke 2. Raja Ampat	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Infrastruktur
32	2	7	4	Pengadaan sarana pasca panen	1. Keerom	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P			Pro P	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
33	2	7	4		Pengadaan dan penyediaan sarana pangan (beras, angkutan beras, non beras)	Provinsi Papua dan Papua Barat	60 Kepala Keluarga	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
34	2	7	4		Pengembangan potensi SDA pertanian	Nabire	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
35	2	7	4		Stimulan pengembangan budaya berbasis ekonomi kreatif	Sorong	1 Kabupaten	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
36	2	7	4		Jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan di daerah tertinggal (Pro P Pembangunan Desa Terpadu)	Jayawijaya	2,24 km	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
37	2	7	4		Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran BUM Desa Bersama (pro p Pembangunan Desa Terpadu)	1. Kota Jayapura 2. Manokwari	2 BUM Desa	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kemiskinan
38	2	7	4		Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prokades di Daerah Tertinggal	1. Sorong 2. Nabire	2 Unit	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kemiskinan
39	2	7	2		Hijauan Pakan Ternak	Papua Barat	5 lokasi	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
40	2	7	2		Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir						
					Optimalisasi Reproduksi	1. Papua 2. Papua Barat	Papua 5.000 ekor Papua Barat 4.500 ekor	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
41	2	7	2		Alat dan Mesin Pertanian Pra Paren Sub Sektor Tanaman Pangan	1. Manokwari 2. Teluk Bintuni 3. Teluk Wondama	Manokwari 30 unit; Teluk Bintuni 5 unit; Teluk Wondama 1 unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
42	2	7	2		Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	1. Teluk Wondama 2. Teluk Bintuni 3. Sorong Selatan 4. Sorong 5. Raja Ampat 6. Merauke 7. Jayapura 8. Kep. Yapen 9. Biak Numfor 10. Mappi 11. Mimika	Teluk Wondama 2 unit; Teluk Bintuni 2 unit; Sorong Selatan 2 unit, Sorong 2 unit, Jayapura 4 unit, Merauke 4 unit, Jayapura 4 unit, Kepulauan Yapen 1 unit, Biak Numfor 3 unit, Raja Ampat 3 unit, Mappi 4 unit, Mimika 7 unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
43	2	7	2		Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	1. Sorong 2. Manokwari Selatan 3. Jayawijaya	Sorong 2 unit; Manokwari Selatan 2 unit; Jayawijaya 2 unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
44	2	7	2		Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	Manokwari	10 unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P			Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
45	2	7	2	UKM yang ditingkatkan kompetensinya melalui penguatan kapasitas yang terstandar: Pelatihan Vocational	1. Kota Jayapura 2. Kota Sorong 3. Manokwari	120 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	UMKM
46	2	7	2		Pembangunan Gudang Unit	1 Unit	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Infrastruktur
47	2	7	2		Rentilisasi Sentra IKM melalui DAK Fisik Sentra IKM	8 IKM	2021-2022	APBN	Kementerian Perindustrian	Kemiskinan
48	2	7	2	Prasarana yang dibangun di SKPT Biak	1. Sorong 2. Sorong Selatan 3. Teluk Bintuni 4. Jayapura 5. Sarmi 6. Biak Numfor 7. Tolikara 8. Nabire 9. Intan Jaya 10. Paniai	3 prasarana	2021	Hibah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
49	2	7	2		Database Program Petani Millenial	20.000 Dokumen	2021-2022	APBN	Kantor Staf Presiden	Kemiskinan
50	2	7	3	Pembangunan Kota Baru Sorong	Pusat Pengembangan Keahlian / Skill Development Center	1 Pusat Pengembangan Keahlian	2021-2022	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan

No	PN / PP / KP / Pro P				Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (satuan dan indikator target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
51	1	4	5	Peningkatan SDM Kelautan dan perikanan	(Fungsi Pendidikan) Kelompok Pelaku Utama / Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Teluk Wondama	185 Kelompok	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
52	1	4	5		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	Provinsi Papua (14 Kelompok) dan Papua Barat (38 Kelompok)	52 Kelompok	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan

c. Bidang Infrastruktur Dasar dan Ekonomi

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
1	5	1	2	Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Provinsi Papua dan Papua Barat	120.478 SR	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
2	5	1	2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 unit	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
3	5	1	2	Sistem pengelolaan air limbah domestik Setempat Skala Individu	Provinsi Papua dan Papua Barat	12.000 unit	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
4	5	1	2	Pembinaan dan Penguasaan Pembangunan SPAM	Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
5	5	1	2	Pembinaan dan Penguasaan Pembangunan Sanitasi	Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
6	5	1	2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P						
					Berbasis Masyarakat				Pemerintah Daerah	
7	5	1	1	Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	Provinsi Papua dan Papua Barat	573 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
					Provinsi Papua dan Papua Barat	372 unit	2021-2022	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
8	5	1	1	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	Jayapura	215 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
9	5	1	1	Rumah Swadaya Afirmasi – Pembangunan Baru	1. Jayawijaya 2. Puncak Jaya 3. Asmat 4. Boven Digoel 5. Keerom 6. Nduga 7. Puncak 8. Intan Jaya 9. Deyai 10. Sorong 11. Marokwari Selatan	873 unit	2021	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
10	5	1	1	Pengembangan Fasilitas	Provinsi Papua dan Papua	10.080 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
				Peningkatan Kualitas Rumah	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Barat			dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	
11	5	1	1	Rumah Swadaya Afirmasi – Peningkatan Kualitas	1. Jayapura 2. Biak Nunfor 3. Kepulauan Yapen 4. Merauke 5. Jayawijaya 6. Paniai 7. Nabire 8. Puncak Jaya 9. Mappi 10. Tolikara 11. Pegunungan Bintang 12. Mamberamo Raya 13. Waropen 14. Yahukimo 15. Supiori 16. Mamberamo Tengah 17. Lanny Jaya 18. Yalimo 19. Deiyai 20. Kota Jayapura 21. Marokwari 22. Fakfak 23. Teluk Bintuni	1.762 unit	2021	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						24. Teluk Wordama 25. Kaitimana 26. Maybrat 27. Pegunungan Arfak 28. Kota Sorong					
12	5	1	1		Rumah Swadaya Kumuh - Peningkatan Kualitas	Kota Jayapura	90 unit	2021	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
						Manokwari	15 unit	2021	DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
13	3	4	2		Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Kota Surabaya 2. Kota Malang 3. Kota Makassar 4. Provinsi DKI Jakarta 5. Minahasa 6. Bantul	6 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
14	3	4	2		Pembangunan Asrama Mahasiswa	1. Kota Surabaya 2. Kota Kota	6 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
16	3	4	2		Pembangunan dan rehabilitasi gedung fungsi sosial dan keagamaan/Papua Youth Creative Hub	Kota Jayapura 3. Kota Malang 4. Makassar Provinsi DKI Jakarta 5. Minahasa 6. Bantul	1 Bangunan Papua Youth Creative Hub	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
17	-	-	-	-	Pembangunan Istana Kepresidenan	Kota Jayapura	Pembebasan Lahan, PS dan DED	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
18	5	1	1		Penataan Kawasan Sambeah Kumuh	Maybrat	1 Kawasan	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
28	5	1	1		Penataan Kawasan Mendukung PON Papua	Kampung Harapan	32 Hektar	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP								
29	5	1	1	Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Penataan Kawasan Kantor Bupati dan Kawasan Alun-Alun Tabap 1	Tambora	1 Kawasan	2022	APBN	Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
30	5	1	1		Pemugaran Permukiman Kumuh	Provinsi Papua	29 Ha	2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
31	7	5	1		Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu	PLBN Yatekun, Boven Digoel	1 Kawasan	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
34	5	1	5	Penggunaan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	Pengendalian banjir Kota Merauke yang dibangun	Provinsi Papua	1,7 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
35	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Brazza yang dibangun	Provinsi Papua	0,15 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
36	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Klafna yang dibangun	Provinsi Papua Barat	0,45 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
37	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	Provinsi Papua Barat	1,4 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
38	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Tabih yang dibangun	Provinsi Papua Barat	0,18 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
39	5	1	5		Pengendalian banjir Sungai Warori yang dibangun	Provinsi Papua Barat	0,4 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
40	5	1	5		Pengendalian banjir sungai	Asmat	0,37 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
41	5	1	5		Pengendalian banjir Kali Yetul	Yahukimo	4,3 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
42	5	1	3		Penyediaan dan penggunaan air baku dan	Provinsi Papua	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
				air tanah						
43	5	1	3	Damau Ayamatu yang direvitalisasi	Provinsi Papua Barat	1 damau	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
44	5	1	3	Rehabilitasi dan Peningkatan Air Baku	Kota Bintuni, Teluk Bintuni Nabire	15 km 1,4 km	2021 2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
45	5	1	3							
46	5	1	3	Pembangunan Air Baku	SA Sungai Wasi Wamena Jayawijaya Tahap I	1 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
47	5	1	3	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Yahukimo	5 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
48	5	1	3	Rehabilitasi Sumur Air Tanah	Keerom	3 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
49	5	1	3	Pembangunan Tampungan Air Hujan Pada Daerah	Kampung Bha Distrik Makim Nabire	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
50	5	1	3							
				Pembangunan Tampung Air Hujan Pada Daerah Kekeritingan	Kampung Nifasi Distrik Makliri Nabire	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
51	5	1	3							
				Pembangunan Tampung Air Hujan Pada Daerah Kekeritingan	Arso V Distrik Arso Kecrom	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
52	5	1	3							
				Pembangunan Tampung Air Hujan Pada Daerah Kekeritingan	Arso VI Distrik Arso Kecrom	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
53	5	1	3							
				Pembangunan Tampung Air Hujan Pada Daerah Kekeritingan	Asmat	4 unit	2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
54	5	1	3							
				Embung Giwu yang Dihangun	Kialele, Giwu Kota Sorong	1 unit	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
55	5	1	3							
				Pembangunan Waduk Warsamson	Provinsi Papua Barat	1 waduk	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
56	5	1	6	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Pembangunan Bendungan	Bendung Wanggar DI Ha Nabire Tahap III	1 bendung	2021	APBN	Pemerintah Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
57	5	1	6	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Daerah irigasi Bomberay yang dibangun	Provinsi Papua Barat	1 DI	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
58	5	1	6		Pembangunan Saluran Primer, Sekunder dan Tersier	DI Kalibumi Kiri Nabire	2,4 km	2021	APBN		
59	5	4	3	Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Gasifikasi pembangkit tenaga listrik/konversi pembangkit listrik BBM menjadi Gas	1. PL TMG Manokwari 2. PL TMG Biak 3. PL TG /MG Biak 2 4. PL TG /MG Nabire 2 5. MPP Jayapura 6. PL TMG Jayapura 7. PL TG /MG Peakar 8. Merauke 2 9. MPP Timika 10. PL TMG Senui	18 Pembangkit	2021-2022	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. Pertamina Persero	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P						
					11. MPP Manokwari 12. MPP Fakfak 13. PLTMG Kaimana 14. PLTG/MG/GU Sorong 2 15. PLTMG Manokwari 3 16. PLTMG Jayapura 17. PLTMG Timika 2 (30 MW) 18. PLTMG Timika 2 (10 MW)					
85	5	4	2	Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20kV	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
86	5	4	2		Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 220 V	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
87	5	4	2		Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
88	5	4	2		Alat Penyimpan Daya Listrik	Provinsi Papua dan Papua	2022	APBN	Kementerian Energi dan	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
89	5	4	1		Perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistri	PLTS Rooftop dan Papua Barat	9 unit	2022	APBN	Sumber Daya Mineral	Infrastruktur
90	5	4	1		Isolated / Komunal/ Hybrid	Provinsi Papua dan Papua Barat	7.200 KW/KWp PLTS; 1.170 KW/KWp PLTD Hybrid	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN Persero	Infrastruktur
91	5	4	2		Supervisi Progres Pembangunan Penyulur BBM Satu Harga	1. Maybrat	4.140,39 KW/KWp	2022	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. Pertamina Persero	Infrastruktur
						2. Bowen	7 Titik Penyulur	2021			
92	5	5	1		Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistri	3. Waropen	16 Titik Penyulur	2022	APBN	Kementerian	Infrastruktur
						4. Mauberram					
						5. Metauke					
						1. Raja Ampat					
						2. Puncak					
						3. Nduga					
						4. Keerom					
						5. Asmat					
						6. Jayawijaya					
						7. Pegunungan Arfak					
						8. Maybrat					
						9. Tambora					
						10. Sorong					
						11. Pantai					
						12. Puncak Jaya					
92	5	5	1		Perencanaan	Palapa Ring	30%	2021-2022	APBN	Kementerian	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
				an infrastruktur pitalabar		permanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95%		APBN, USO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
93	5	5	1	BTS/Laenuile	Provinsi Papua dan Papua Barat	452 unit eksisting, 5,204 unit baru	2021-2022	APBN, USO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
94	5	5	1	Akses Internet	Provinsi Papua dan Papua Barat	1.236 unit eksisting, 6,229 unit baru	2021-2022	APBN, USO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
95	7	1	3	Komunikasi Publik/Disciminasi Informasi melalui Media Kominfo (GPR TV)	Provinsi Papua dan Papua Barat	12 Jangkauan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs
96	7	1	3	Komunikasi Publik/Disciminasi Informasi mengenai Slunting	Provinsi Papua dan Papua Barat	6 Spot/Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs
97	7	1	3	Disciminasi Informasi bidang Politik Hukum dan Keamanan	Provinsi Papua dan Papua Barat	15 Spot/Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs
98	7	1	3	Disciminasi Informasi bidang Perekonomian dan Maritim	Provinsi Papua dan Papua Barat	14 Spot/Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs
99	7	1	3	Disciminasi Informasi bidang Pembangunan Manusia dan	Provinsi Papua dan Papua Barat	15 Spot/Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penaung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP								
100	7	1	3	Kebudayaan Diseminasi informasi di wilayah 3T melalui mitra strategis	Provinsi Papua dan Papua Barat	17 Spot/ Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SDGs	
101	5	2	4								
102	5	2	4								
103	5	2	4								
104	5	2	4	Jembatan udara	Pengembangan Bandara Eelilim	Yalimo	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
105	5	2	4	Peningkatan Bandara Wamena	Jayawijaya	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
106	5	2	4	Pengembangan Bandara Tanah Merah	Boven Digoel	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
107	5	2	4	Pengembangan Bandara Korowai Batu	Boven Digoel	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
108	5	2	4	Pengembangan Bandara Nop Goliath	Yahukimo	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
109	5	2	4	Pengembangan Bandara Korupun	Yahukimo	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
110	5	2	4	Pengembangan Bandara Mozes Kilangin	Mimika	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
111	5	2	4	Pengembangan Bandara Oksibil	Pegunungan Bintang	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
112	5	2	4	Pengembangan Bandara Ilaga	Puncak Jaya	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
				Pengembangan Bandara Mulia	Lanny Jaya	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur	
				Pengembangan Bandara Tiom	Papua	1 lokasi	2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Kemiskinan	

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
113	5	2	4	Penunjang, Kargo dan EBM Pembangunan Arstirp	1. Agendadugume, Puncak 2. Sinak, 3. Kwirok, 4. Aboy, 5. Teraplu, 6. Korupun, 7. Sobaham, 8. Aboget/Eci, 9. Senggo, 10. Manggelum, 11. Anggel, 12. Towe Hilam, Kecrom	2021: 12 unit 2022: 1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
114	5	2	4		Yahukimo	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
115	5	2	4	Pembangunan bandara baru	Teluk	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
					Bandara Wasior Baru				Perhubungan	
116	5	2	4		Pembangunan Bandara Siboru	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
117	5	2	4	Pengembangan Bandara Hub Primer; Pengembangan bandara yang mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KII)	Teluk Bintuni	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
118	5	2	4		Teluk Bintuni	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
119	5	2	4		Raja Ampat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
120	5	2	4	Pengembangan Bandara Kepi	Mappi	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
121	5	2	4	Hub Primer	Asmat	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
122	5	2	4		Merauke	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
123	5	2	4		Manokwari	1 unit	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
124	5	2	4		Pegunungan Arfak	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
126	2	7	3	Pengembangan kota baru di Provinsi Papua Barat	Kota Sorong	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
127	2	7	3		Kota Sorong	1 kegiatan	2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
128	5	2	3	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan yang dikembangkan	Mimika	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
129	5	2	3	Pembangunan Pelabuhan Mopra	Mappl	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
130	5	2	3	Pembangunan Pelabuhan Kaimana	Kaimana	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
131	5	2	3	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kepulauan Yapen	Kepulauan Yapen	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
132	5	2	3	Pembangunan Pelabuhan Sarmi	Sarmi	1 unit	2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
133	5	2	3	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Karas	Faklak	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
134	5	2	3	Pembangunan Pelabuhan Sorong	Kota Sorong	1 unit	2021-2022	BUMN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
135	5	2	5	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bate	Asmat	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
136	5	2	5	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Sorong	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
137	5	2	5	Pembangunan Pelabuhan Klademak	Sorong	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
138	5	2	5	Pembangunan	Raja Ampat	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
					Pelabuhan Penyeberangan Salawati Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baranta Pembangunan Pelabuhan Sungai Akat Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawarna Pembangunan Pelabuhan Sungai Papera						
139	5	2	5			Raja Ampat	1 unit	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
140	5	2	5			Asmat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
141	5	2	5			Asmat	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
142	5	2	5			Asmat	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
143	5	2	5			Asmat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
144	5	2	5			Asmat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
145	5	2	5			Papua	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Kemiskinan
147	5	2	1			Papua	550,33 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
148	5	2	1			Papua Barat	172,03 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
149	5	2	1		Papua	9.606 m	2021-2022	APBN	dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
				Pembangunan Jembatan di Jalan Trans Papua					Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
150	5	2	1		Pegunungan Bintang	14,55 km	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
				Pembangunan Jalan Perbatasan						
151	5	2	1		Blak Numfor	27,1 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
				Pembangunan Jalan Trans Pulau Blak						
152	2	7	4		Kota Jayapura	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
				Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)						
153	5	1	4		Provinsi Papua Barat	82 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan
				Pembinaan dan Pendidikan SDM keseluruhan dan						
154	5	1	4		Provinsi Papua Barat	1600 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan
				keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan						
155	5	1	4		Provinsi Papua Barat	82 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan
				Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pendidikan) Bidang Transportasi Udara						
				Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pendidikan)						

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
156	5	1	4		Transportasi Laut Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut	Provinsi Papua dan Papua Barat	4152 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan
157	5	1	4		Diklat Pembentukan Reguler (Polat Pembblitan) Transportasi Darat	Provinsi Papua dan Papua Barat	21 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Pendidikan

d. Bidang Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP								
1	6	2	1	Integrasi Kerjasama Kebljakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana	Raja Ampat	1 kajian risiko bencana kawasan parwisata yang disusun	2021	APBN	Badan Nasional Penanggu- lang an Bencana	SDGs
2	6	2	1	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	Provinsi Papua dan Kabupaten / Kota di Provinsi Papua	15 Dokumen Materi Teknis, Dokumen Buku Rencana, Album Peta, Rancangan Peraturan Daerah. dan Naskah Akademik	2021 - 2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	SDGs	
3	6	2	1	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	Provinsi Papua Barat dan Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat	7 Dokumen Materi Teknis, Dokumen Buku Rencana, Album Peta, Rancangan Peraturan Daerah, dan Naskah Akademik	2021 - 2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	SDGs	
4	6	2	1	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak	Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik sektor perumahan dan infrastruktur	Provinsi Papua	2 Pendampingan	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggu- lang an Bencana	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
5	6	2	1	Bencana	Melaksanakan inventarisasi, verifikasi, dan pendampingan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan daerah terdampak pascabencana	1. Teluk Wondama 2. Fakfak	2 Kegiatan	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
6	6	2	1		Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasca) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Provinsi Papua Barat	80 orang yang didampingi dalam mengkaji kebutuhan pascabencana (Jitupasca) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
7	6	1	3	Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	1 lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	2022 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
8	3	6	3	Penataan pengusahaan dan pemilikan TORA	Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Maybrat	1674 Hektar	2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
9	3	6	3	(termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Pegunungan Arfak	2.029,2 Hektar	2021	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
10	3	6	3		Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Jayawijaya	1.8277 Hektar	2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
									Kehutanan	
11	6	1	1	Perencanaan kebakaran hutan dan lahan	Provinsi Papua	32 desa rawan karhutla yang dievakuasi dari kebakaran hutan dan lahan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
12	6	1	1	Perencanaan kebakaran hutan dan lahan di Desa Rawan Karhutla	Provinsi Papua Barat	28 desa rawan karhutla yang dievakuasi dari kebakaran hutan dan lahan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
13	6	1	1	Peningkatan kebakaran hutan dan lahan melalui Pemadaman Darat	Provinsi Papua	32 kegiatan pemadaman darat	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
14	6	1	1	Peningkatan kebakaran hutan dan lahan melalui Pemadaman Darat	Provinsi Papua Barat	28 kegiatan pemadaman darat	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
15	6	1	1	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH	Provinsi Papua dan Papua Barat	4 unit lembaga / komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat peduli belia lingkungan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
16	6	1	1	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 Unit sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					lingkungan hidup						
17	6	1	1		Kawasan konservasi perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Operasional	Kawasan konservasi perairan di Provinsi Papua dan Papua Barat	5,53 juta ha kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	2021 – 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
18	1	4	2		Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	1. TWP Paduido (Papua) 2. SAP Raja Ampat 3. SAP Waigeo Sebelah Barat (Papua Barat)	1,17 luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	2021 – 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
19	1	4	2		Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Provinsi Papua Barat	1.610.298 ha Kawasan konservasi baru	2021 – 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
20	6	2	1		Pengujian Data, Informasi, dan Literasi Bencana	Provinsi Papua Barat	70 SDM yang mengikuti diklat teknis dan simulasi PB di daerah	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
				Bencana di daerah						
21	6	2	1	Budaya Sadar Bencana	1. Biak Nuntor 2. Asmat 3. Mamberamo Raya 4. Dogiyai (2021) 5. Sorong 6. Jayapura (2022)	7 Kegiatan	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Pengulangan Bencana	SDGs
22	6	2	1	Penyelesaian sarana dan prasarana jaringan komunikasi pusatops bidang Data, Informasi dan Komunikasi Penggunaan Bencana	Mamberamo Raya	1 Pengadaan	2021	APBN	Badan Nasional Pengulangan Bencana	SDGs
23	6	1	4	Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Provinsi Papua dan Papua Barat	4 Kasus sengketa lingkungan hidup	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
24	6	1	4	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan p21	Provinsi Papua dan Papua Barat	20 kasus	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
25	6	1	4	PPNS LHK yang Ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 PPNS LHK (orang)	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P						
26	6	2	1	Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Pendampling Penanganan korban dan Pengungsi 1. Fakfak 2. Teluk Wondam a 3. Teluk Birtuni 4. Sorong 5. Manokwari 6. Kota Selatan 7. Jayapura a 8. Biak 9. Numfor 10. Mappi 11. Mamberamo Raya	40 Pendampling Penanganan korban dan Pengungsi	2022	APBN	Badan Nasional Penganggulangan Bencana	SDGs
27	6	2	1	Pendampling Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	1. Kota Sorong 2. Fakfak 3. Sorong Selatan 4. Kalimanan a 5. Merauke 6. Nabire 7. Mimika 8. Kota Jayapura a 9. Biak 10. Numfor 11. Tolikara Digaei	51 rancangan bangun sistem penganggulangan bencana yang disusun	2022	APBN	Badan Nasional Penganggulangan Bencana	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
						12. Mamberamo 13. Kepulauan Yapen 14. Sarmi 15. Jayawijaya 16. Keerom 17. Mappi					
28	6	2	1		Penguatan Mitigasi Objek Ketangguhan	1. Manokwari 2. Nabire 3. Mimika 4. Kota Sorong	160 Kegiatan	2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
29	6	1	4		Operasi pengamanan kawasan hutan	Provinsi Papua dan Papua Barat	16 operasi pengamanan kawasan hutan	2021 – 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
30	6	1	4		Operasi peredaran Hasil Hutan Ilegal	Provinsi Papua dan Papua Barat	18 operasi penbalaan liar, tumbuhan dan satwa	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
31	6	1	4		Ukuran dan/atau kegiatan yang diawasi keuatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 usaha/ kegiatan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
32	6	1	4	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PPLH yang Ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	10 PPLH (orang)	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
33	6	2	1	Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	Pemenuhan kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana	Provinsi Papua dan Barat	1 layanan pemenuhan kebutuhan logistik Penanggulangan Bencana	2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
34	6	2	2	Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	Provinsi Papua dan Barat	3 kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
35	6	2	2		Rehabilitasi hutan mangrove	Provinsi Papua dan Barat	75 ha luas rehabilitasi hutan mangrove	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
36	6	3	1	Pembangunan Rendah Karbon	Komunikasi dan Sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs

No	PN / PP / KP			Pro P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
37	6	3	1		Penyusunan Model Sistem Dinamik dan Skenario Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan model sistem dinamik dan skenario kebijakan pembangunan Rendah Karbon (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
38	6	3	1		Pengendalian sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan AKSARA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan data RPRKD Kab/Kota (laporan)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
39	6	3	1		Penyediaan basis data kegiatan mitigasi lingkungan provinsi dan kab/kota pada Sistem AKSARA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen basis data kegiatan mitigasi (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
40	6	3	1		Pemetaan Sektor Swasta/Non State Actor (NSA) Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen daftar Sektor Swasta/NSA yang berpotensi mendukung Program Pembangunan Rendah Karbon (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
41	6	3	1		Pemandangan Kesepakatan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota Percontohan dan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Pemandangan Kesepakatan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon (dokumen kesepakatan)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Swasta						
42	6	3	1		Penyusunan laporan pelaksanaan implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan pelaksanaan pilot implementasi (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
43	6	3	1		Penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen RPRKD (Dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
44	6	3	1		Penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Pergub RPRKD (pergub)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
45	6	3	1		Penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen RPRKD (Dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
46	6	3	1	Peretapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Rerdah Karbon Daerah (RPRKD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Pergub RPRKD (pergub)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
47	6	3	1	Pengeraan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan AKSARA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 laporan data RPRKD Kab/Kota [laporan]	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
48	6	3	1	Perediaan basis data kegiatan mitgasi lingkup provinsi dan kab/kota pada Sistem AKSARA	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen basis data kegiatan mitgasi (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
49	6	3	1	Pemetaan Sektor Swasta/Non State Actor (NSA) Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Rerdah Karbon	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 dokumen daftar Sektor Swasta/NSA yang berpotensi mendukung program PRK (dokumen)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs
50	6	3	1	Penandatangan Kesepakatan Implementasi Pembangunan Rerdah Karbon antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota Percontohan dan Swasta	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Jumlah Penandatangan Kesepakatan Implementasi Pembangunan Rerdah Karbon (dokumen kesepakatan)	2021	PHLN	Pemerintah Daerah; Mitra Pembangunan	SDGs

c. Bidang Tata Kelola Pemerintahan, dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
1	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Provinsi Papua dan Papua Barat	5.917 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
2	7	4	1	Manajemen Talenta Nasional ASN	Pusat	3 Kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
3	7	4	1		Pusat	1 Kebijakan (Pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
4	7	4	1	Pemangangan ASN Papua di K/L	Pusat	1 Surat Menteri	2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
6	7	4	4	Optimalisasi SDM Unggul di BUMN	Pusat	1 Kebijakan	2021	APBN	Kementerian BUMN	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro-P			Pro-P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
					pengadaan SDM OAP pada K/L						
7	7	4	4		Pendampingan Pengembangan Kinerja Bagi OAP di BUMN	Pusat	85 Orang	2021-2022	APBN	Kementerian BUMN	SDGs
8	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	450 Desa	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
9	2	7	4		Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village	Provinsi Papua dan Papua Barat	1 Kebijakan (Pertahun)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
10	2	7	4		Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	Provinsi Papua	200 Desa	2021-2022	PHLN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
11	2	7	4		Desa Digital yang dikembangkan melalui Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Pendamping Desa (P3PD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	9.028 Desa (2021); 15.000 Orang (2022)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Pro-P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
12	2	7	4		Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Akademi Desa 4.0	Provinsi Papua dan Papua Barat	30.000 Orang (pertahun)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
13	3	6	3		Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas Tor a	Provinsi Papua dan Papua Barat	28.000 Bidang	2021-2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah	SDGs
14	3	6	3		Kepastian hukum dan legalisasi Hak Atas Tanah Adat	Pusat	33 Kantor Wilayah (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah	SDGs
15	7	1	3		Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan daerah	Pusat, Provinsi Papua dan Papua Barat	207 Spot/Kegiatan	2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Luar Negeri	SDGs
16	2	7	4		Pembangunan Dukungan	Provinsi Papua	1 Layanan	2021	APBN	Kementerian	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Pro-P	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab		7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP									
17	2	7	4	Desa Terpadu	Manajemen P3PD Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Yang telah ditingkatkan kualitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	670 Orang	2021	APBN	Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri		SDGs
18	3	6	3	Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas Tora	Kepastian Hukum dan legalisasi Hak Atas Tanah Obyek Reforma Agraria	Provinsi Papua dan Papua Barat	8.477 Bidang	2021-2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		SDGs
19	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Facilitasi Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Provinsi Papua dan Papua Barat	62 Orang	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		SDGs
20	2	7	4		Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	Provinsi Papua	218 Desa	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri		SDGs
21	7	1	1	Penguatan Demokrasi di Daerah	Facilitasi penguatan demokrasi di daerah	Provinsi	15 Provinsi (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri		SDGs
22	3	1	2	Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendataran penduduk dan	Facilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Admnduk (GISA) di wilayah 3T	Provinsi Papua	10 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri		SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
23	7	2	3	Pencatatan Sipil Bagi Kelompok Khusus Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia Yang Diterima Kerjasama internasional di Kawasan Timur, Pasifik, Afrika dan ASEAN untuk bidang pemerintahan, pertahanan, perbatasan, Politik dan Keamanan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan/distrik	Pusat	23 Kesepakatan	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs
24	2	7	5	Peningkatan Peran Distrik Sebagai Role Model Pembangunan (distrik Membangun, Membangun Distrik)	Provinsi Papua	71 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
25	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu Rekomendasi Status Perkembangan Kawasan Perdesaan	Provinsi Papua dan Papua Barat	1 Rekomendasi Kebijakan	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
26	4	1	6	Pembinaan Ideologi Pancasila, penguatan pendidikan Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Provinsi	16 Provinsi (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Pemanggun Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP								Pro-P
27	7	4	4	kewarngan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara Memingkatkan dan memastikan transformasi pelayanan publik yang terpadu	di daerah Pendampingan Mal Pelayanan Publik di Wilayah III Provinsi Papua dan Papua Barat	6 Lembaga (wilayah KTI)	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs	
28	4	1	4	Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Terbuka, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan	Provinsi	16 Provinsi (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
29	2	7	5	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan	Angkatan pengembangan kompetensi manajemen strategi	Provinsi Papua dan Papua Barat	330 Orang	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P						
30	7	4	4	Pusat-Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	pembangunan dan inovasi daerah		2021-2022	APBN	Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
					Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah III	Provinsi Papua dan Papua Barat				
31	7	1	2	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	Pendidikan politik masyarakat di daerah	Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
32	2	7	4	Pembangunan Desa Terpadu	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Provinsi Papua dan Papua Barat	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
33	7	2	3	Peningkatan Instansi/Posisi Indonesia Yang Diterima	Prakarsa/Rekomend asi Indonesia Pada Forum Kerjasama Intarakawasan dan Antarkawasan Aspasaf	Pusat	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs
34	2	7	5	Peningkatan Kapasitas	Penguatan Pranata Adat Dalam Penanganan Konflik	Sorong	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP							
				Pemerintahan Daerah dan Hubungan	Sosial				Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	
35	2	7	5	Pusat-Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Pusat	1 Rekomendasi Perdas turunan UU No.21 Tahun 2001	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
36	2	7	5	Protonsi Papua Barat	Pusat	1 Rekomendasi Perdasus turunan UU No.21 Tahun 2001	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri	
37	2	7	5	Revisi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua	Pusat	3 Rancangan UU	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
38	2	7	4	Papua Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting	Provinsi Papua	27 Kabupaten (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	SDGs
39	7	2	3	Peningkatan Insiatif/Posisi Indonesia Yang Diterima	Pusat	112 Promosi	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs
40	7	2	4	Rekomendasi dalam Bidang Pengamanan orang Asing /LSM dan Informasi	Pusat	107 Rekomendasi	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs
41	2	7	5	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan	Sorong	1 kabupaten	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun Penyelesaian	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P					Tertinggal dan Transmigrasi	
42	7	4	2	Pusat-Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat			2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
				Pelayanan publik berbasis elektronik (e- services) yang terintegrasi	Fasilitasi penerapan sistem pembangunan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kab / Kota				
43	7	2	2	Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia Yang Diterima	Pusat	10 Kegiatan	2021-2022	APBN	Kementerian Luar Negeri	SDGs
					Pertanian dan Industri, keuangan, pembangunan, pendidikan, UMMK, pemanfaatan bencana, Sarana Informasi Kesehatan (Telemedicine), Pertanian					

2. Program Prioritas Tinggi

a. Program Prioritas Tinggi Bidang SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua

No	PN/PP/KP/Pro-P/Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
1	3	4	2	2	Pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), ADIK, KIP Kuliah, dan LPDP	Provinsi Papua dan Papua Barat	2.895 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
2	3	4	2	2	Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Provinsi Papua dan Papua Barat	4.234 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
							5.851 orang	2022	APBN, APBD		
3	3	4	2	2	Beasiswa KIP Kuliah	Provinsi Papua dan Papua Barat	21.467 orang	2021	APBN, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
							28.019 orang	2022	APBN, APBD		

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
4	3	4	2	2		Beasiswa LPDP	Provinsi Papua dan Papua Barat	-	2021- 2022	APBN	Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
5	3	3	5	1	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penyediaan alat kesehatan Puskesmas	1. Asmat 2. Biak Numfor 3. Boven Digel 4. Deiyai 5. Dogiyai 6. Intan Jaya 7. Jayapura 8. Jayawijaya 9. Kepulauan Yapen 10. Lanny Jaya 11. Mamberam 12. Mamberam o Raya 13. Mappi o Tengah 14. Merauke 15. Mimika 16. Nabire 17. Nduga 18. Paniai	40 Kab/Kota	2021- 2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						19. Pegunungan Bintang 20. Puncak 21. Puncak Jaya 22. Sarmi 23. Supiori 24. Tolikara 25. Waropen 26. Yahukimo 27. Jayapura 28. Fakfak 29. Kaimana 30. Manokwari 31. Manokwari Selatan 32. Maybrat 33. Pegunungan Arfak 34. Raja Ampat 35. Sorong 36. Sorong Selatan 37. Tambora 38. Teluk Bintuni 39. Teluk Wondama 40. Kota Sorong						

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
6	3	3	5	1		Penyediaan alat kesehatan Rumah Sakit	1. RSUD Faldak 2. RSUD Kab Sorong 3. RSUD Manokwari 4. RSUD Provinsi Papua Barat 5. RSUD Kaimana 6. RSUD Sebelao 7. RSUD Raja Ampat 8. RSUD Teluk Wondama 9. RSUD Sele Be Solu 10. RSUD Merauke 11. RSUD Wamena 12. RSUD Yowari 13. RSUD Nabire 14. RSUD Serui 15. RSUD	35 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							Pantai 16. RSUD Mulla 17. RSUD Kab Mimika 18. RSUD Boven Digoel 19. RSUD Mappi 20. RSUD Asmat 21. RSUD Dekai 22. RSUD Oksibil 23. RSUD Sarmi 24. RSUD Kwalingga 25. RSUD Jayapura 26. RSUD Alepura 27. RSJ Alepura 28. RSU Blak 29. RSUD Tiom					

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P								
7	3	3	5	1		Pembangunan RS Pratama	1. Pegunungan Arfak (2020) 2. Pegunungan Bintang (2020) 3. Puncak (2017) 4. Mimika (2022)	1 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
8	3	3	5	1		Pembangunan RS Vertikal Papua	Jayapura	1 RS	2021-2022	PHLN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
9	3	3	5	1		Pelayanan kesehatan bergerak	Provinsi Papua	6 Desa	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
10	3	3	5	1		Pelayanan kesehatan bergerak	Provinsi Papua Barat	6 Desa	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
11	3	3	5	1		Lembaga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam memenuhi persyaratan survei akreditasi (dekori)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
12	3	3	5	1	Sosialisasi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya (dekan)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
13	3	3	5	1	Dukungan akreditasi Puskesmas	1. Biak Numfor 2. Jayapura 3. Jayawijaya 4. Merauke 5. Mimika 6. Nabire 7. Paniai 8. Puncak Jaya 9. Kepulauan Yapen 10. Kota Jayapura 11. Sarmi 12. Keerom 13. Yahukimo 14. Pegunungan Bintang 15. Tolikara 16. Boven Digoel 17. Mappi 18. Asmat 19. Waropen 20. Supiori 21. Mamberam	29 Kab/Kota	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							22. Mamberamo Raya 23. Yalimo 24. Lanny Jaya 25. Nduga 26. Dogiyai 27. Puncak 28. Intan Jaya 29. Deyai					
14	3	3	5	1		Dukungan akreditasi Puskesmas	1. Fakfak 2. Marokwari 3. Sorong 4. Kota 5. Sorong 6. Raja Ampat 7. Selatani 8. Teluk 9. Bintuni 10. Wondama 11. Kalimata 12. Maybrat 13. Tambora 14. Marokwari 15. Pegunungan Arfak	13 Kab/Kota	2021- 2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
15	3	3	5	1		Dukungan akreditasi Rumah Sakit	1. RSUD Mulla, RSUD Rumah Rodo Fabo RS 2. Pratama Elfrida Sara 3. RSUD Lukas Erembe Mamberamo Tengah 4. RSUD Intan Jaya 5. RSUD 6. Pratama Waghele 7. RS Pratama Warmane 8. RSUD Provinsi Papua Barat	9 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
16	3	3	5	1		Facilitasi dan pembinaan daerah standar RS Pendidikan (Dekonsentrasi)	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Provinsi	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
17	3	3	5	1	Pelatihan manajemen Puskesmas	Provinsi Papua dan Papua Barat	192 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
18	3	3	1	1	Pelayanan kesehatan reproduksi remaja	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
19	3	3	1	1	Pelayanan Antenatal Care (ANC)/ pemeriksaan selama kehamilan	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua dan 13 Kab/Kota di Papua Barat)	90%	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
20	3	3	1	1	Program Rumah Tanggu persalinan	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	42 Kab/Kota	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
21	3	3	1	1	Pelayanan Persalinan Nakes	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	91%	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
22	3	3	1	1	Pelayanan Post Partum/ setelah kelahiran	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	90%	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro-P								
23	3	3	1	1	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penguatan Puskesmas PONEB	Lokus tahun 2021 adalah 11 puskesmas	11 Puskesmas	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
24	3	3	1	1	Penurunan kematian ibu dan bayi	Penguatan RS PONEK	Lokus tahun 2021 adalah 6 RS	6 RS	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
25	3	3	1	1		Penguatan PSC 119	1. Sorong 2. Mappi	2 Kab/Kota	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
26	3	3	2	1	Penurunan stunting	Penyediaan makanan tambahan ibu hamil KEK	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	92%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
27	3	3	2	1		Penyediaan makanan tambahan balita kurus	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	92%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
28	3	3	2	1	Pelaksanaan Surveilans Gizi	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	90%	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan	

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P								
29	9	9	8	1		Tenaga kesehatan yang dilatih Pemantauan Pertumbuhan Balita	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	250 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
30	5	5	4	1		Penyediaan Antropometri Kit	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	90%	2021-2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
31	7	7	6	1		Tenaga Kesehatan yang dilatih Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	152 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
32	8	8	7	1		Tenaga kesehatan yang dilatih Pencegahan dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk pada Balita	42 Kab/Kota (29 Kab/Kota di Papua; 13 Kab/Kota di Papua Barat)	490 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
33	3	7	2	2	Pembangunan	Pembangunan Perguruan	Pegunungan Bintang	1 paket	2021	APBD	Pemerintah Daerah;	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
					dan Peningkatan Pendidikan Tinggi dan Vokasi Yang Berkualitas	Tinggi Okmin 1. Penyediaan lahan 2. Penyediaan dokumen perencanaan 3. Pembangunan Gedung 4. Penyediaan tenaga dosen dan kependidikan					Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
34	3	4	2	1		Operasionalisasi Asrama Mahasiswa Nusantara	1. Kota Malang 2. Yogyakarta 3. Makassar 4. Minahasa 5. Jakarta	Rancangan Perpres Asrama Mahasiswa Nusantara	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
35	3	7	2	1		Pengembangan Pusat Kajian Beraraf Internasional (Kebudayaan) Universitas Cenderawasih	Kota Jayapura	1 paket	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
36	3	7	2	1		Pengembangan Pusat Kajian Biodiversity Berarif Internasional Universitas Papua	Manokwari	1 paket	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
37	3	4	2	1		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas Cenderawasih	Kota Jayapura	1 Gedung kuliah Fakultas Ilmu Kelahiranagan	2021	SBSN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
								1 KDP Rumah Sakit	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan	Infrastruktur
38	3	4	2	1		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas Musamus	Merauke	1 KDP Auditorium	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
										Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
38	3	4	2	1	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Universitas Negeri Papua	Manokwari	1 gedung perpustakaan	2021-2022	SBSN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
										Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
39	3	4	2	1	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana ISBI Tanah Papua	Kota Jayapura	Persiapan Pembangunan Gedung perkuliahan	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
40	3	4	2	1	Pembangunan Universitas Kamasan	Biak Numfor	Persiapan kajian	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Infrastruktur
							Pelaksanaan kajian	2022			
41	3	7	1	3	Guru Keliruan dan instruktur kursus yang mengkait Upskilling dan Reskilling	Provinsi Papua dan Papua Barat	56 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penaung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P								
						Berstandar Industri						
42	3	7	1	3		Pengembangan SMK Mendukung Industri Pertanian, Pariwisata, dan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	2 sekolah	2021	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Pendidikan
43	3	7	1	3		SMK yang Mengembangkan Teaching Factory	Provinsi Papua Barat	2 sekolah 1 sekolah	2021 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Pendidikan
44	3	7	1	3		Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK	Provinsi Papua Barat	3 sekolah	2021-2022	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Pendidikan
45	3	7	1	3		Start Up Inovasi Masyarakat	Provinsi Papua Barat	6 Start Up	2021	APBN	Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
46	3	4	2	1	Pembangunan dan Peningkatan Sekolah Berpola Asrama	Pembangunan Unit Sekolah Baru Berpola Asrama	SMA Unggulan Kasuari Manokwari (Distrik Manokwari Selatan)	6 unit	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
47	3	4	2	1	Revitalisasi SMA Berpola Asrama	Revitalisasi SMA Berpola Asrama	1. SMA Negeri 3 Kota Jayapura 2. SMA Negeri Kepulauan Yapen 3. SMA Negeri Ilaga Puncak	3 paket	2021-2022	DAK, APBD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
53	3	4	2	1		Pembinaan SD SMP Satu Atap	Provinsi Papua dan Papua Barat	900 lembaga	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
54	3	4	1	1		Penerapan Kurikulum dan Pembelajaran Inovatif	1. Sarimi 2. Jayapura 3. Kota Jayapura 4. Kerom 5. Meraike	Model kurikulum masyarakat adat	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
55	3	4	2	1		Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri	1. MAIN IC Sorong 2. MAIN Keerom	3 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan
56	3	4	2	1		Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri	1. MIN Keerom 2. MIN 1 Meraike 3. MIN Fak Fak 4. MIN Yamuethi Kokoda Sorong Selatan 5. MIN Aimas Sorong	5 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
57	3	4	2	1		Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Madrasah Tsana'iyah Negeri	1. MTsN Merauke 2. MTsN Sorong 3. MTsN Fakfak	3 paket	2021	SBSN	Kementerian Agama	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P								
58	3	4	2	3	Pembentukan <i>Informal Learning Center</i>	Penyusunan kurikulum pendidikan nonformal berbasis kearifan lokal	42 Kab /kota di Papua dan Papua barat	500 learning center	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
59	3	4	2	3		Pembentukan lembaga pengelola pusat belajar informal	42 kabupaten/ kota	22 lembaga/ organisasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
60	3	4	2	3		Pembangunan pusat belajar dan sarana prasarana penunjang	42 Kab /Kota	4 gedung dan sarana prasarana penunjang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Tim	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Pangung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
61	3	4	2	3							Staf Khusus Presiden RI	
						Tot kurikulum	42 Kab/Kota	44 pelatihan	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Partwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
62	3	4	2	3		Monitoring dan evaluasi	42 Kab/Kota	44 dokumen	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Partwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
63	3	4	2	3		Publikasi pameran, kompetisi, webinar,	42 Kab/Kota	22 pameran	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						podcast, produk					Teknologi, Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	
64	3	4	2	3		Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk	42 Kab/Kota	44 kompetisi	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
65	3	4	2	3		Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk	42 Kab/Kota	264 podcast	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
66	3	4	2	3		Penyusunan	42 Kab/Kota	1 modul	2021-	APBN	Kementerian	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						modul dan pengukuran perubahan perilaku secara online			2022		Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	
67	3	4	2	3		Publikasi pameran, kompetisi, webinar, podcast, produk.	42 Kab/Kota	22 produk	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
68	3	3	5	1	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Pengembangan Telemedicine di RSUD dan Puskesmas	1. Keerom (RSUD Keerom) 2. Mamberamo Raya (RSUD Kawerau) 3. Tolikara (RS Prutama	4 RSUD dan 45 Puskesmas	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							4. Karubaga) Marokwari (RS Pratama Wartamare) 5. Kaimana (Puskesmas Wako, Puskesmas Kambala 6. Marokwari (Puskesmas Prafi, Puskesmas Masni, Puskesmas Sidey) 7. Marokwari Selatan (Puskesmas Ransiki) 8. Maybrat (Puskesmas Ayanmaru, Puskesmas Aifai) 9. Pegunungan Arlak (Puskesmas Anggi) 10. Sorong Selatan (Puskesmas					

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							5 Teminabuan, Puskesmas Moswaren) 11. Teluk Bintuni (Puskesmas s Babo, Puskesmas Aranday) 12. Sorong (Puskesmas s Klamoro, Puskesmas Mayamuk. Puskesmas Makbon) 13. Fakfak (Puskesmas s Karas, Puskesmas Bombetral) 14. Teluk Wondama (Puskesmas s Wasior) 15. Raja Ampat (Puskesmas s Waisai) 16. Nabire (Puskesmas					

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							Wangger sa ri, Puskesmas SP 1) 17. Biak Nunfor (Puskesmas Ampobuko r, Puskesmas Yondori) 18. Mamberam o Tengah (Puskesmas Ilugwa) 19. Mappi (Puskesmas Kota I, Puskesmas Ecl, Puskesmas Bade, Puskesmas Mur, Puskesmas Sahapkiya 20. Boven Digel (Puskesmas Ninanti) 21. Mimika (Puskesmas					

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							21. Puskesmas Potowalbiru, Puskesmas Kokona, Puskesmas Agimuga 22. Yapi (Puskesmas Merawai, Puskesmas Mumbel, Puskesmas Kosiwo) 23. Sarmi (Puskesmas Bonggo, Puskesmas Bonggo Timur, Puskesmas Betaf, Puskesmas Burtin, Puskesmas Sarmi) 24. Jayapura (Puskesmas Denta, Puskesmas Unurungu ay, Puskesmas					

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
							Sawoyi					
69	3	3	5	1		Penyediaan Telemedicine di Papua	Lokus tahun 2021 adalah 3 fasyankes	18 Fasyankes	2021- 2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
70	3	3	5	1		Penyediaan Telemedicine di Papua Barat	Lokus tahun 2022 menunggu usul dari Dinas Kesehatan Provinsi	11 Fasyankes	2021- 2022	DAK	Kementerian Kesehatan; Pemerintah Daerah	Kesehatan
71	3	3	5	2	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	1. RSUD Boven Digel 2. RSUD Kaimana 3. RSUD Yowari 4. RSUD Sentani 5. RSUD Nabire Rumah Rodo Fabo 6. RSUD	80 orang	2021- 2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
72	3	3	5	2		Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat	Papua dan Papua Barat	135 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
73	3	3	5	2		Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Papua dan Papua Barat	470 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
74	3	3	5	2	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Provinsi Papua	25 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
75	3	3	5	2	Pelatihan Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas (Dekonsentrasi)	Provinsi Papua Barat	25 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
76	3	3	5	2	Pelatihan Uji Kompetensi Jabling Kesehatan (Dekonsentrasi)	Papua dan Papua Barat	60 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
77	3	3	5	2	Pelatihan Surveilans Kesehatan Berbasis Epidemiologi Bagi Petugas Puskesmas (Dekonsentrasi)	Papua dan Papua Barat	120 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P							
78	3	3	5	2	Pelatihan Promosi Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas (Dekonsentrasi)	Papua dan Papua Barat	60 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
79	3	3	5	2	Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas (Dekonsentrasi)	Papua dan Papua Barat	600 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Kesehatan	Kesehatan
80	3	5	3	1	Manajemen talenta Papua Pengembangan Talenta Muda Papua dan Penyelenggaraan Kejuaraan di Tingkat Provinsi (menuju Nasional dan Internasional)	Provinsi Papua dan Papua Barat	680 peserta didik	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
81	3	5	3	1	Mem bangun dan mengem bangka n sistem data base talenta muda Papua	Pusat	12.000 data entry	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
						yang terintegrasi						
82	3	5	3	1		Penyusunan Modul Pelatihan: Nasionalisme, Kepemimpinan, pengembangan diri	Pusat	Penyusunan Kerangka Modul, FGD Modul Pelatihan, penerbtiian, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Modul	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
83	3	5	3	1		Tot Modul Pelatihan	Pusat	90 pelatih	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
84	3	5	3	1		Pendampingan dan pembinaan talenta muda Papua	Nasional	2.000 profil	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P								
85	3	5	3	1		Branding talenta	Nasional	288 publikasi	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
86	3	5	3	1		Distribusi talenta	Nasional	1 regulasi/ Kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
						(Afirmasi Action untuk ASN, BU/MN dan Perusahaan multinasional)						
87	3	5	3	1		Gedung dan fasilitas penunjang serta operasional	Pusat	Diskusi lintas K/L, Penda dan Universitas dan 11 Pusat Studi	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
88	3	5	3	1		Sekretariat MTP	Pusat	Gedung Sekretariat	2021	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
89	3	5	3	1		Operasional sekretariat	Pusat	10 staf	2021-2022	APBN	Kementerian Dalam Negeri; Tim Staf Khusus Presiden RI	Pendidikan
90	3	4	3	3	Penguatan Kebijakan Khusus Untuk Guru	Pengangkatan Guru Honorer Sebagai Guru Tetap (P3K)	Provinsi Papua dan Papua Barat	Papua: 4669 orang Papua Barat: 2.750 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
91	3	4	3	3	Rekrutmen Guru ASN		Provinsi Papua dan Papua Barat	Yahukimo: 758 Yalimo: 327 Papua Barat: Kab. Teluk Wondama: 313 Teluk Bintuni: 554 Maybrat: 144 Pegunungan. Arfak: 420	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
92	3	4	3	2	Guru Yang Mengikuti Pembinaan Sertifikasi Guru		Provinsi Papua dan Papua Barat	727 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
93	3	7	1	1		Revisi Spektrum Keahlian SMK (Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2 018) dan Spektrum Keahlian SMK (Perdijen Dikdasmen Nomor 07/D.D5/KK/2 018)	Pusat	1 kebijakan	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan
94	3	7	1	1		Revisi/asi Kurikulum: Pengembangan Kurikulum Keguruan Kompetensi Sosial Budaya (Sekolah Pendidikan Guru) Kolese Pendidikan Guru	1. Merangka 2. Mimika 3. Nabire 4. Sorong	Modul	2021- 2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
95	3	7	1	1		Peserta Mengikuti Penyelenggaraan Rekrutasi Pendidikan Lammpau	1. STIKES Jayapura 2. STIKES Papua 3. STMik Kresdindo Manokwari 4. Univ Amal Iltiah Yapik Wamena 5. Univ Kristen Papua 6. Univ. Muhamma diyah Sorong 7. STTE Port Mumbay, STMik Aganua Wamena 8. STMik 10 Nov JP 9. STKIP Kristen Wamena	4.272 mahasiswa	2021-2022	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P								
96	3	5	3	1	Pembinaan Papua sebagai provinsi olahraga	Kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda / Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Anti Paham Radikalisme	Papua dan Papua Barat (Online)	Orang	2021-2022	APBN dan APBD	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
97	3	7	4	3	Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO / Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan	Papua dan Papua Barat	Jumlah siswa atlet yang dibina dalam PPLP Provinsi Papua dan Papua Barat	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs	
98	3	7	4	2	Pemanfaatan olahraga Eks PON XX dan PEPARNAS XVI 2020	Papua dan Papua Barat	Persentase	2021-2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs	

No	PN / PP / KP / Pro-P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro-P	Program							
99	3	7	4	2		Penyelenggaraan n Kejuaraan Olahraga Nasional dan / atau Internasional dalam Rangka Mendukung Pemanfaatan Pasarana Olahraga PON XX dan PEPARNAS XVI 2020	Papua dan Papua Barat	Paket	2021- 2022	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDGs

b. Program Prioritas Tinggi Bidang Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir

No	PN / PP / KP / Pro P			Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Pemangung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP									
1	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Kawasan Sagu	1. Sorong Selatan 2. Sorong 3. Jayapura 4. Mimika 5. Mappi	Sorong Selatan 100 Ha; Sorong 100 Ha; Jayapura 100 Ha; Mimika 100 Ha; Mappi 200 Ha	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
2	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Kebun Sumber Berih Tanaman Perkebunan	1. Papua Barat 2. Fakfak 3. Kalimantan 4. Teluk Wondama 5. Manokwari 6. Tambora 7. Papua 8. Merauke 9. Jayawijaya 10. Nabire 11. Biak Nunfor 12. Mimika 13. Boven Digoel 14. Sarmi	Papua Barat 2 Ha; Fakfak 21 Ha, Kalimantan 4 Ha; Teluk Wondama 2 Ha; Manokwari 1 Ha; Tambora 1 Ha; Papua 2 Ha; Papua 4 Ha; Merauke 6 Ha; Jayawijaya 1 Ha; Nabire 10 Ha; Biak Nunfor 5 Ha, Mimika 5 Ha, Boven Digoel 1 Ha, Sarmi 5 Ha	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
3	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	1. Teluk Wordama 2. Teluk Bintuni 3. Marokward	36 Unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
4	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	1. Teluk Wordama 2. Teluk Bintuni 3. Sorong 4. Sorong Selatan 5. Raja Ampat 6. Merauke 7. Jayapura 8. Kep. Yapen 9. Blak Numfor 10. Mimika 11. Mappi	31 Unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
5	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	1. Sorong 2. Marokwardi Selatan 3. Jayawijaya	Sorong 2 unit; Marokwardi Selatan 2 unit; Jayawijaya 2 unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
6	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	DAK Fisik Bidang Pertanian Provinsi	Provinsi Papua dan Papua Barat	861 paket	2021	DAK	Kementerian Pertanian; Pemerintah Daerah	Kemiskinan
7	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas	DAK Fisik Bidang pertanian	Provinsi Papua dan Papua	254 Paket	2021	DAK	Kementerian Pertanian;	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
					Unggulan	Kab/Kota	Barat				Pemerintah Daerah	
8	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	DAK Non Fisik Bidang Pertanian Kab/Kota	Provinsi Papua dan Papua Barat	42 Paket	2021	DAK	Kementerian Pertanian; Pemerintah Daerah	Kemiskinan
9	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Pengadaan sarana pasca panen	Keerom	1 Paket	2021	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
10	2	7	2	12	Pengembangan Komoditas Unggulan	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	Manokwari	10 Unit	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
11	2	7	2	12	Program Petani Milenial	Database Program Petani Milenial	Provinsi Papua dan Papua Barat	20.000 Dokumen	2021-2022	APBN	Kantor Staf Presiden	Kemiskinan
12	2	7	2	12	Pengembangan Sentra Ternak	Hijauan Pakan Ternak	Provinsi Papua Barat	5 Lokasi	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
13	2	7	2	12	Pengembangan Sentra Ternak	Optimalisasi Reproduksi	Provinsi Papua dan Papua Barat	9.500 ekor	2022	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
14	2	7	2	12	Pengembangan Sentra Ternak	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Provinsi Papua dan Papua Barat	6 Unit	2021	APBN	Kementerian Pertanian	Kemiskinan
15	2	7	2	12	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Blak Numfor yang mandiri	Blak Numfor	Tingkat Kemandirian 5	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
16	2	7	2	12	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Teluk Wondama	185 kelompok	2021-2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
17	2	7	2	12	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Prasarana yang dibangun di SKPT Blak	Blak Numfor	3 prasarana	2021	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
18	2	7	2	12	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Lembaga pengelola SKPT Mimika yang dibina dan dioptasionalkan	Mimika	1 lembaga	2021 - 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
19	2	7	2	12	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Merauke yang Mandiri	Merauke	1 lembaga	2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemiskinan
20	2	7	2	12	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	640 orang	2021 - 2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan
21	2	7	2	12	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	Facilitasi penyelesaian masalah strategis di KKK Sorong	Sorong	1 badan usaha	2021 - 2022	APBN	Badan Koordinasi Penanaman Modal	SDGs
22	2	7	2	12	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	Facilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	Teluk Bintuni	1 kegiatan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Perindustrian	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P			Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP								
23	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat Perencanaan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	DPP Raja Ampat	2 lokasi DPP	2021 - 2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
24	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Branding dan Prioritas (destinasi I)	DPP dan Destinasi Branding	12 destinasi	2021 - 2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
25	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat Penerapan Sustainable Tourism Practices Di Destinasi Utama dan Prioritas	Raja Ampat	1 destinasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
26	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat Pusat Informasi Pariwisata berbasis Geopark	16 Geopark dalam DPP	3 unit	2021 - 2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
27	2	7	2	12	Pengembangan DPP Raja Ampat Rencana Induk Pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP)	Raja Ampat	1 dokumen	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
28	2	7	2	12	Pengembangan DPP Biak Teluk Cenderawasih Pengembangan pariwisata bahari Taman Nasional	Teluk Wondama	1 paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi	Kemiskinan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
						Laut Teluk Cenderawasih					Kreatif	
29	2	7	2	12	Pengembangan DPP Blak Teluk Cenderawasih	Penetapan Sail Teluk Cenderawasih	Blak Numfor	1 paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
30	2	7	2	12	Pengembangan DPP Blak Teluk Cenderawasih	Rehabilitasi kawasan situs budaya Gereja Tua Isna Jeli Yendi, dan Gua Tengkorak Ros war di Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih	Teluk Wondanna	1 paket	2022	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kemiskinan
31	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kespematan Kerja	1. Purwak Jaya 2. Fakrak	2 kegiatan	2021	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
32	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	1. Sorong 2. Keerom	1 kegiatan	2021	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
33	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pembangunan Balai Latihan Kerja	1. Marokwari 2. Blak Numfor 3. Mumlaka	3 BLK	2022	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
34	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pusat Pengembangan Keahlian/ Skol Development Center (Fungsi Pendidikan)	Kota Sorong	1 pusat pengembangan keahlian	2022	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan

No	PN / PP / KP / Pro P				Program	Rincian Output (RO)	Lokasi	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
35	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	UKM yang ditingkatkan kompetensinya melalui penguatan Kapasitas yang terstandar: Pelatihan Vokasional	1. Kota Jayapura 2. Kota Sorong 3. Manokwari	4 angkatan (120 orang)	2021 - 2022	APBN	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Usaha Mikro dan Kecil
36	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Pelaksanaan Sekolah Pasar	Provinsi Papua dan Papua Barat	690 pengelola pasar	2022	APBN	Kementerian Perdagangan	Kemiskinan
37	2	7	2	12	Pembangunan BLK dan Pendidikan vokasional	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Provinsi Papua	710 orang	2021-2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kemiskinan

c. Program Prioritas Tinggi Bidang Infrastruktur Dasar dan Ekonomi

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
1	5	2	1	1	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke- Sorong	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke- Sorong (MP)	Provinsi Papua	550,33 km	2021- 2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
2	5	2	1	1		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke- Sorong (MP)	Provinsi Papua Barat	172,03 km	2021- 2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
3	5	2	1	1		Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Provinsi Papua	9606 km	2021- 2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
4	5	2	3	1	Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Pengembangan Pelabuhan Sorong	Kota Sorong	1 unit	2021- 2022	BUMN	PT. Pelindo IV, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
5	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Ekelim	Yalimo	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
6	5	2	4	1		Peningkatan Bandara Warena	Jayawijaya	1 unit	2021- 2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
7	5	2	4	1	Pembangunan Airstrip dan Jembatan Udara 37 Rule di Papua	Pengembangan Bandara Tanah Merah	Boven Digol	1 unit	2021- 2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
8	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Koroai Baru	Boven Digol	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
9	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Nop Goliath	Yahukimo	1 unit	2021- 2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
10	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Korpun	Yahukimo	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
11	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Mozes Kliangin	Mimika	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
12	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Oksibil	Pegunungan Bintang	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
13	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Ilaga	Purwak	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
14	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Mulia	1. Purwak Jaya	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
15	5	2	4	1		Pengembangan Bandara Tiom	Lanny Jaya	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
16	5	2	4	5		Penyediaan Subsidi Perintis Penumpang, Kargo dan BBM	Papua	1 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Kemiskinan
17	5	2	4	1		Pengembangan Airstrip	Agardugume, Puncak	2021: 12 unit 2022: 1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
18	5	2	4	2		Pembangunan Bandara Wasior Baru	Teluk Wondama	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
19	5	2	4	2		Pengembangan Bandara Martda Waisai	Raja Ampat	1 unit	2021	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
20	5	2	4	2		Pengembangan Bandara Rendani	Manokwari	1 unit	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
21	5	2	4	2		Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Kota Sorong	1 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
22	5	2	4	2		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta	Raja Ampat	1 unit	2021-2022	APBN, SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
23	5	2	4	2		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong	Sorong	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penaanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
24	5	2	4	2		Pembangunan Pelabuhan Peryerangan Salawati Kab. Raja Ampat	Raja Ampat	1 unit	2021-2022	SBSN	Kementerian Perhubungan	Infrastruktur
25	5	2	1	6	Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pembangunan Jalan Trans Pulau Blak	Blak Nunfor	27,1 km	2021	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Infrastruktur
26	3	4	2	1	Pembangunan gedung strategis Istana Presiden, Papua Youth Creative Hub, Asrama Mahasiswa Nusantara, PLBN	Penyusunan DED Asrama Mahasiswa Nusantara	1. Kota Surabaya 2. Kota Malang 3. Kota Makassar 4. Provinsi DKI Jakarta 5. Minahasa 6. Bantul	6 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur
27	3	4	2	1		Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara	1. Kota Surabaya 2. Kota Malang 3. Kota Makassar 4. Provinsi	6 lokasi	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
							DKI Jakarta 5. Minahasa 6. Bantul					
28	3	4	2	1		Pembangunan dan rehabilitasi gedung fungsi sosial dan keagamaan/Papua Youth Creative Hub	Kota Jayapura	1 Bangunan Papua Youth Creative Hub	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Infrastruktur
29	-	-	-	-		Pembangunan Istana Kepresidenan	Kota Jayapura	Pembebasan Lahan, FS dan DED	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Infrastruktur
30	7	5	1	3		Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu	PLBN Yarekun, Boven Digoel	1 Kawasan	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Infrastruktur
31	5	5	1	1	Pengembangan Infrastruktur Pita Lebar	Palapa Ring	Provinsi Papua dan Papua Barat	30% pemanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95%	2021-2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
32	5	5	1	1		BTS/Lastmile	Provinsi Papua dan Papua Barat	452 unit eksisting, 5.204 unit baru	2021-2022	APBN, USO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur

No	PN / PP / KP / Pro P/ Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penaanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
33	5	5	1	1		Akses Internet	Provinsi Papua dan Papua Barat	1.236 unit eksisting, 6.229 unit baru	2021-2022	APBN, USO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Infrastruktur
34	5	4	2	2	Pembangunan Listrik Perdesaan	Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20kV	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	218,12 kms	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
35	5	4	2	2		Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 220 V	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	113,9 kms	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
36	5	4	2	2		Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL)	Provinsi Papua dan Papua Barat	478 unit	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
37	5	4	2	2		Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL)	Provinsi Papua dan Papua Barat	12.586 unit	2022	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Infrastruktur
38	5	4	2	2		Isolated/Komunal/Hybrid	Provinsi Papua dan Papua Barat	7.200 KW/KWP PLTS; 1.170 KW/KWP PLTD Hybrid	2021	BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. PLN Persero	Infrastruktur
39	5	4	2	2			Provinsi Papua dan Papua Barat	4.140,39 KW/KWP	2022			
40	5	4	2	2			Provinsi Papua dan Papua Barat	573 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Infrastruktur
41	5	1	1	1		Penyediaan Akses Perumahan Layak dan	Provinsi Papua dan Papua Barat	372 unit	2021-	DAK		

No	PN / PP / KP / Pro P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
					Aman		Papua dan Papua Barat		2022		Rakyat, Pemerintah Daerah	
42	5	1	1	3		Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Provinsi Papua dan Papua Barat	10.080 unit	2021-2022	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Infrastruktur
43	5	1	2	1	Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Provinsi Papua dan Papua Barat	120.478 SR	2021-2022	APBN, APBD, DAK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah	Infrastruktur
44	5	1	2	1		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 unit	2021-2022			
45	5	1	2	1		Sistem pengelolaan air limbah domestik Setempat Skala Individu	Provinsi Papua dan Papua Barat	12.000 unit	2021-2022			

d. Program Prioritas Tinggi Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P			(Satuan dan Indikator Target)					
1	6	2	1	4	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman	Raja Ampat	1 kajian risiko bencana kawasan pariwisata yang disusun	2021	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs	
2	6	2	1	4	Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	Provinsi Papua dan Kab /Kota di Provinsi Papua	15 Dokumen Materi Teknis, Dokumen Buku Rencana, Album Peta, Rancangan Peraturan Daerah, dan Naskah Akademik	2021 - 2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	SDGs
3	6	2	1	4	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	Provinsi Papua Barat dan Kab /Kota di Provinsi Papua Barat	7 Dokumen Materi Teknis, Dokumen Buku Rencana, Album Peta, Rancangan Peraturan Daerah, dan Naskah Akademik	2021 - 2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	SDGs	
4	6	2	1	6	Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fiskal sektor perumukiman dan infrastruktur	Provinsi Papua	2 Pendampingan	2021-2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs	

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
5	6	2	1	6	Melaksanakan inventarisasi, verifikasi, dan pendampingan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan daerah terdampak pascabencana	1. Teluk Wonda 2. Fakfak	2 Kegiatan	2021-2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
6	6	2	1	6	Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Provinsi Papua Barat	80 orang yang didampingi dalam mengkaji kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	2021-2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
7	6	1	3	3	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Provinsi Papua dan Papua Barat	1 lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	2022-2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
8	3	6	3	1	Penataan penggunaan dan pemilihan Tanah Objek Reforma Agraria (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	2029, 2 Hektar	2021	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penaung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
9	6	1	1	4	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahar di Desa Rawan Karhutla	Provinsi Papua	32 desa rawan karhutla yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahar	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
10	6	1	1	4	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahar di Desa Rawan Karhutla	Provinsi Papua Barat	28 desa rawan karhutla yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahar	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
11	6	1	1	4	Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahar melalui Pemadaman Darat	Provinsi Papua	32 kegiatan pelaksanaan kegiatan pemadaman darat	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
12	6	1	1	4	Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahar melalui Pemadaman Darat	Provinsi Papua Barat	28 kegiatan pelaksanaan kegiatan pemadaman darat	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
13	6	1	1	4	Peningkatan kapasitas dan kesadaran dalam pengelolaan LH	Provinsi Papua dan Papua Barat	4 unit lembaga/komunita s yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
14	6	1	1	4	Peningkatan kapasitas dan kesadaran dalam masyarakat dalam pengelolaan LH	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 unit sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup [adwiyata]	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								
15	6	1	1	6	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Operasional	Kawasan konservasi Perairan di Prov Papua dan Papua Barat	5,53 juta ha kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	2021 - 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
16	1	4	2	1	Perlindungan wisata bahari dan jasa maritim	Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	1. TWP Padaido (Papua) 2. SAP Raja Ampat 3. SAP Waigeo Sebelah Barat (Papua Barat)	1,17 juta ha luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
17	1	4	2	1	Perlindungan wisata bahari dan jasa maritim	Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Papua Barat	1.610,298 ha Kawasan konservasi baru	2021 - 2022	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SDGs
18	6	2	1	1	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Stimulasi PB di daerah	Provinsi Papua Barat	70 SDM yang mengikuti diklat teknis dan stimulasi PB di daerah	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
19	6	2	1	1	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Budaya Sadar Bencana	1. Blak Numfor 2. Asmat 3. Mamberamo Raya 4. Dogiyal (2021) 5. Sorong 6. Jayapura (2022)	7 Kegiatan	2021 - 2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
20	6	2	1	1	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pusdalops bidang Data, informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana	Manberamo Raya	1 Pengadaan	2021	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs
21	6	1	4	3	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Sengketta Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Kasus sengketta lingkungan hidup	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								
22	6	1	4	3	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Kasus tindak pidana Lingkungan Hidup Ketutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Provinsi Papua dan Papua Barat	40 kasus	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketutanan	SDGs
24	6	1	4	3	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	PPNS LHK yang Ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	8 PPNS LHK (orang)	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketutanan	SDGs
25	6	2	1	7	Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Penguatan Mitigasi Objek Ketangguhan	1. Manokwari 2. Nabire 3. Mimika 4. Kota Sorong	160 Kegiatan	2022	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								
26	6	1	4	2	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Operasi pengamanan kawasan hutan	Provinsi Papua dan Papua Barat	16 operasi pengamanan kawasan hutan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
27	6	1	4	2	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Operasi peredaran Hasil Hutan Illegal	Provinsi Papua dan Papua Barat	18 operasi pembalakan liar, tumbahan dan satwa	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
28	6	1	4	2	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakkan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup Kehutanan	Provinsi Papua dan Papua Barat	30 usaha/kegiatan	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan	
	PN	PP	KP	Pro P								
29	6	1	4	2	Penguatan sistem perizinan pengawasan dan penegakan hukum bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	PPLH yang Ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Papua dan Papua Barat	10 PPLH (orang)	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
30	6	2	2	1	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Penguatan kelompok kerja manajemen mangrove dan forum peduli mangrove	Provinsi Papua dan Papua Barat	3 kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs
31	6	2	2	1	Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Rehabilitasi hutan mangrove	Provinsi Papua dan Papua Barat	75 Ha luas rehabilitasi hutan mangrove	2021 - 2022	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SDGs

c. Program Prioritas Tinggi Bidang Tata Kelola Pemerintahan, dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM

No	PN / PP / KP / Pro P / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
1	2	7	4	4	Pendampingan Desa	Provinsi Papua dan Papua Barat	5.917 Orang	2021- 2022	APBN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan	SDGs

No	PN / PP / KP / Program				Program	Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P								
2	7	4	1	1	Manajemen Talenta ASN dan Anak Papua	Kebijakan afirmasi bidang perencanaan dan pengadaan SDM OAP pada K/L	Pusat	3 Kebijakan	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
3	7	4	1	1		Kebijakan afirmasi bidang perencanaan dan pengadaan SDM OAP untuk Mahasiswa dan Taruna/Taruni Sekolah Kedinasaan	Pusat	1 kebijakan (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
4	7	4	1	1		Pemagangan ASN Papua di K/L	Pusat	1 Surat Menteri	2022	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SDGs
5	7	4	4	2		Kebijakan afirmasi bidang perencanaan dan pengadaan SDM OAP pada K/L	Pusat	1 kebijakan	2021	APBN	Kementerian BU/MN	SDGs
6	2	7	4	2		Pendampingan Pengembangan Kinerja Bagi OAP di BU/MN	Pusat	85 orang	2021-2022	APBN	Kementerian BU/MN	SDGs
7	2	7	4	4		Pengembangan Desa Digital yang	Provinsi	450 desa	2021-	PHLN	Kementerian	SDGs

No	PN / PP / KP / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
					Desa Digital	dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD)	Papua dan Papua Barat			Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
8	2	7	4	4	Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village	Provinsi Papua dan Papua Barat	1 kebijakan (pertahun)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
9	2	7	4	4	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	Provinsi Papua	200 desa	2021-2022	PHLN	Kementerian Dalam Negeri	SDGs
10	2	7	4	4	Desa Digital yang dikembangkan melalui Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Pendamping Desa (P3PD)	Provinsi Papua dan Papua Barat	9.028 Desa (2021) dan 15.000 Orang (2022)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	SDGs
11	2	7	4	4	Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Akademi Desa 4.0	Provinsi Papua dan Papua Barat	30.000 orang (pertahun)	2021-2022	PHLN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan	SDGs

No	PN / PP / KP / Program				Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P							
12	3	6	3	2	Pemataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	Provinsi Papua dan Papua Barat	28.000 bidang	2021-2022	APBN	Transmigrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah	SDGs
13	3	6	3	2	Kepastian hukum dan legalisasi Hak Atas Tanah Adat	Pusat	33 Kantor Wilayah (pertahun)	2021-2022	APBN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah	SDGs
14	7	1	3	1		Pusat, Provinsi Papua dan Papua Barat	207 Spot/ Kegiatan	2022	APBN	Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Luar Negeri	SDGs

No	PN / PP / KP / Program					Rencana Aksi (RO)	Lokus	Target (Satuan dan Indikator Target)	Tahun	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	7 Fokus Pembangunan
	PN	PP	KP	Pro P	Program							
						Papua dan Papua Barat						

Keterangan:
PN : Prioritas Nasional.
PP : Program Pritritas.
KP : Kegiatan Pritritas.
Pro P : Proyek Pritritas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttid

SUHARSO MONARFA